



LAPORAN KEUANGAN **AUDITED TA 2025**

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

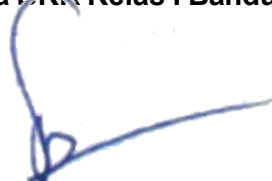
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandung, 8 Mei 2025

Kepala BKK Kelas I Bandung



dr. Sedya Dwisangka, M.Epid
NIP. 196901042002121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	4
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	6
A.1 Dasar Hukum	6
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4 Dasar Pengukuran	9
A.5 Kebijakan Akuntansi	10
A.6 Capaian Output	18
A.7 Capaian Output Program Nasional	19
A.8 Informasi Lainnya	21
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1 Pendapatan	22
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	23
B.2 Belanja	25
B.2.1 Belanja Pegawai	27
B.2.2 Belanja Barang	29
B.2.3 Belanja Modal	31
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	32
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	32
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	32
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	32
C.4 Persediaan	32
C.5 Tanah	37
C.6 Peralatan dan Mesin	37

C.7	Gedung dan Bangunan	38
C.8	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39
C.9	Aset Tetap Lainnya	39
C.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39
C.11	Aset Tak Berwujud	40
C.12	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	40
C.13	Aset lain-lain	41
C.14	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	42
C.15	Utang kepada Pihak Ketiga	43
C.16	Ekuitas	44
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	45
D.2	Beban Pegawai	47
D.3	Beban Persediaan	49
D.4	Beban Barang dan Jasa	49
D.5	Beban Pemeliharaan	51
D.6	Beban Perjalanan Dinas	51
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	52
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	52
D.9	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	53
D.10	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	53
D.11	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	53
D.12	Pos Luar Biasa	54
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
E.1	Ekuitas Awal	55
E.2	Surplus (Defisit) LO	55
E.5	Transaksi Antar Entitas	55
E.6	Ekuitas Akhir	57
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	58

IV. LAMPIRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Bandung, 8 Mei 2026 **Kepala**
BKK Kelas I Bandung

Desy Dwisangka, M.Epid
NIP. 196901042002121003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.625.740.211 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.625.740.211 atau mencapai 504,27 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.710.525.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.852.217.879 atau mencapai 77,76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp28.103.396.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp69.665.175.895 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.209.910.446; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp68.217.901.590 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp237.363.859.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp276.552.457 dan Rp69.388.623.438

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.616.155.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp28.251.641.996 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-

19.635.486.996, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.709.192 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-19.631.777.804.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp70.716.982.011, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-19.631.777.804 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 18.303.419.231 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp69.388.623.438

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024**

U R A I A N	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.710.525.000	8.625.740.211	504,27	7.942.900.001
JUMLAH PENDAPATAN	1.710.525.000	8.625.740.211	504,27	7.942.900.001
BELANJA				
Belanja Pegawai	12.998.369.000	12.970.690.899	99,79	12.029.470.077
Belanja Barang	14.367.336.000	8.177.276.137	56,92	13.215.042.631
Belanja Modal	737.691.000	704.250.843	95,47	2.461.580.000
JUMLAH BELANJA	28.103.396.000	21.852.217.879	77,76	27.706.092.708

Bandung, 8 Mei 2026
Kepala BKK Kelas I Bandung

 **Kemenkes**

dr. Setiawan Dwisangka, M.Epid
NIP. 196901042002121003

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024

U R A I A N	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-
Piutang Perpajakan	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjual	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti R	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntuta	-	-
Persediaan	1.209.910.446	1.186.380.844
Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah Aset Lancar	1.209.910.446	1.186.380.844
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
Jumlah Properti Investasi	-	-
ASET TETAP		
Tanah	38.455.235.600	38.455.235.600
Tanah Belum Diregister	-	-
Peralatan dan Mesin	43.182.042.326	43.220.960.443
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-
Gedung dan Bangunan	29.429.070.250	29.429.070.250
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	683.893.440	683.893.440
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(43.532.340.026)	(42.205.923.109)
Aset Konsesi Jasa	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-
Jumlah Aset Tetap	68.217.901.590	69.583.236.624
ASET LAINNYA		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tak Berwujud	-	168.580.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	237.363.859	336.895.487
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	-	-
Aset Lain-lain	2.852.894.619	2.399.510.969
Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(2.852.894.619)	(2.568.090.969)

Jumlah Aset Lainnya	237.363.859	336.895.487
JUMLAH ASET	69.665.175.895	71.106.512.955
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	276.552.457	389.530.944
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	276.552.457	389.530.944
JUMLAH KEWAJIBAN	276.552.457	389.530.944
EKUITAS		
Ekuitas	69.388.623.438	70.716.982.011
JUMLAH EKUITAS	69.388.623.438	70.716.982.011
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	69.665.175.895	71.106.512.955



Bandung, Mei 2026
Kepala BKK Kelas I Bandung

Dr. Restu Dwisangka, M.Epid NIP.
196001042002121003

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Perpajakan	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	8.616.155.000	7.877.400.001
Jumlah Pendapatan	8.616.155.000	7.877.400.001
BEBAN		
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	12.970.690.899	12.029.470.077
Beban Persediaan	5.168.946.182	6.011.608.997
Beban Barang dan Jasa	5.214.881.277	7.770.503.796
Beban Pemeliharaan	1.301.866.065	1.361.100.938
Beban Perjalanan Dinas	1.410.471.696	3.864.706.515
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.184.785.877	2.358.251.766
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	-	-
Jumlah Beban	28.251.641.996	33.395.642.089
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(19.635.486.996)	(25.518.242.088)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	8.566.400	65.500.000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.857.208)	(1.291.388)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3.709.192	64.208.612
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(19.631.777.804)	(25.454.033.476)
Pos Luar Biasa		
Pendapatan PNPB	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Persediaan	-	-
-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19.631.777.804)	(25.454.033.476)



 2 Mei 2026
 Kepala BKK
 Kelas I Bandung
Kemenkes
 dr. Sedya Dwi Angka, M.Epid
 NIP. 198004042002121003

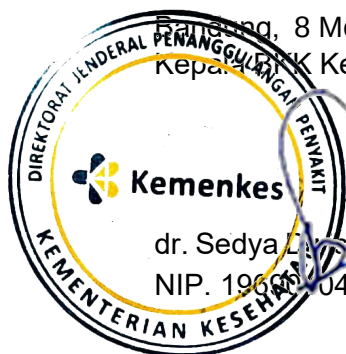
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	70.716.982.011	71.793.261.669
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.631.777.804)	(25.454.033.476)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-
Selisih Revaluasi Aset	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-	-
Koreksi Lain-Lain	-	-
Jumlah	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.303.419.231	24.377.753.818
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.328.358.573)	(1.076.279.658)
EKUITAS AKHIR	69.388.623.438	70.716.982.011

Bandung, 8 Mei 2026
Kepala BKK Kelas I Bandung



Kemenkes
dr. Sedya Dyan Sangka, M.Epid
NIP. 196601042002121003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.5/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis

Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berkedudukan di Provinsi Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. BKK Kelas I Bandung mempunyai 5 (Lima) Wilayah Kerja Pelabuhan dan 1 (satu) layanan kantor induk yang terdiri dari :

1. Kantor Induk Bandar Udara Husein Sastranegara,
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Cirebon,
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Indramayu,
4. Wilayah Kerja Pelabuhan Patimban
5. Wilayah Kerja Pelabuhan Palabuhanratu Sukabumi

6. Wilayah Kerja Bandar Udara Jawa Barat Kertajati

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung memiliki tujuan strategis yaitu terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100%. Sasaran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah;
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit.

Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas BKK Kelas I Bandung, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran
2. Pelaksanaan pengawasan alat angkut, orang, barang dan/ lingkungan
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut , orang, barang, dan/ lingkungan
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan

7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerjasama di bidang kekarantinaan kesehatan
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Unaudited TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul GLP, Modul Aset dan Modul Persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan Modul Aset dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

SAI saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran

yang diterapkan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unaudited TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung

dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000; (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset

Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.5/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Batas Wilayah Administrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, Peta Tematik Lainnya	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Dasar Teliti, Citra Satelit Resolusi Sedang, Atlas	10
Peta LLN Skala Menengah, Peta LPI Skala Menengah	12
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta LLN Skala Kecil, Peta LPI Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, Data Gaya berat	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung yang kemudian disesuaikan apabila ada pemenuhan kewajiban, baik sebagian maupun keseluruhan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Capaian Output
Satker*

A.6. Capaian Output Satker

Sampai dengan periode 31 Desember 2025, kertas kerja capaian output pada satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

Kertas Kerja Capaian Output Balai Kekarantinaan Kelas I Bandung

No	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk
				Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	
1	BKK Kelas I Bandung	12	27	27	0	27	100

*Capaian Output
Program Prioritas
Nasional*

A.7. Capaian Output Program Prioritas Nasional

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025- 2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung memiliki tujuan strategis yaitu terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100%. Pada BKK Kelas I Bandung melaksanakan PN sesuai RPJMN 2025 dengan kegiatan sebagai berikut

1. Layanan Pengendalian Faktor Risiko penyakit Pelabuhan dan Bandara,
2. Sosialisasi dan Diseminasi,
3. Layanan pengendalian Lingkungan,
4. Layanan Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS,
5. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria, PES, DBD,
6. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD, Diare,
7. Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan Kesehatan,
8. Pelatihan Kesehatan,
9. Pelayanan Kesehatan Haji

melalui kegiatan prioritas yang terdapat pada BKK Kelas I Bandung yang tersebar di 5 wilayah kerja dan 1 pos Bandara, dengan pagu mencapai Rp 6.949.809.000 dan realisasi sebesar Rp2.787.563.650. atau 40.11%. Realisasi rendah karena terdapat pagu yang di blokir sebesar Rp

4.127.711.000 sehingga pagu efektif yang bisa di belanjakan Rp2.822.098.000 apabila menggunakan anggaran pagu efektif maka realisasi sudah mencapai 98,77% dan Capaian Output mencapai 100% terlaksana.

Rincian kertas kerja capaian output di BKK Kelas I Bandung adalah sebagai beriku

Tabel 4
Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas Nasional

No.	Rincian Output	Alokasi Anggaran (.)	Blokir Anggaran (.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (.)	Realisasi Fisik Output	
1.	001 Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	66.000.000	66.000.000	165	Orang	0	165	Orang
2.	012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (orang)	317.600.000	259.196.000	1.700	Orang	58.274.119	1.700	Orang
3.	016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (layanan)	644.920.000	538.452.000	16	Layanan	157.860.724	16	Layanan
4.	017 layanan pemeriksaan orang. barang. alat angkut (layanan)	1.470.568.000	1.111.199.000	21	Layanan	359.044.955	21	Layanan
5.	U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (layanan)	32.000.000	0	20	Layanan	32.000.000	20	Layanan
6.	U07 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	14.448.000	9.498.000	12	Layanan	4.925.800	12	Layanan
7.	U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes (layanan)	19.775.000	9.912.000	7	Layanan	9.861.000	7	Layanan
8.	U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (Layanan)	8.622.000	5.284.000	18	Layanan	3.332.000	18	Layanan
9.	U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (layanan)	39.420.000	21.600.000	30	Layanan	17.736.000	30	Layanan
10.	U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (layanan)	109.100.000	94.000.000	20	Layanan	15.060.000	20	Layanan

No.	Rincian Output	Alokasi Anggaran (.)	Blokir Anggaran (.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (.)	Realisasi Fisik Output	
11.	U27 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	1.102.000.000	538.200.000	8	Layanan	56.3645.940	8	Layanan
12.	U30 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori III	637.000.000	310.500.000	5	Layanan	326.418.170	5	Layanan
13.	001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (paket)	2.208.734.000	956.178.000	14	Paket	1.219.100.388	14	Paket
14.	001 Pelatihan kesehatan (orang)	228.122.000	207.692.000	44	Orang	20.304.554	44	Orang

Informasi Lainnya

A.8. Informasi Lainnya

1. Penyusunan Laporan Keuangan BKK Kelas I Bandung telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN Bandung 1 melalui aplikasi MonSAKTI.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan BKK Kelas I Bandung telah dilakukan reviu oleh Satuan Kepatuhan Intern (SKI) pada tanggal 26 sd 27 Januari 2026 2025

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 12 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pagu BKK Kelas I Bandung mengalami pemblokiran sebesar Rp 6.170.995.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 21.932.401.000 walaupun besara pagu DIPA tidak ikut berubah. Perubahan terjadi juga pada penambahan pagu bersumber PNBP dengan jenis belanja modal. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.710.525.000	1.710.525.000
Jumlah Pendapatan	1.710.525.000	1.710.525.000
Belanja		
Belanja Pegawai	12.648.668.000	12.998.369.000
Belanja Barang	14.665.537.000	14.367.336.000
Belanja Modal	-	737.691.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	27.314.205.000	28.103.396.000

Realisasi
Pendapatan
Rp8.625.740.211

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.625.740.211 atau mencapai 504,27 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.710.525.000. Pendapatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.625.740.211. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.710.525.000	8.625.740.211	504,27
Jumlah	1.710.525.000	8.625.740.211	504,27

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 8,60 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.625.740.211	7.942.900.001	8,60
Jumlah	8.625.740.211	7.942.900.001	8,60

*Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp8.625.740.211*

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp8.625.740.211 dan Rp7.942.900.001. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,60 dari TA 2024.

Kenaikan total PNBPN sebesar Rp 682.840.210 didorong sepenuhnya oleh lonjakan pada Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan yang naik signifikan sebesar Rp 984.225.000 (+14,68%). Hal ini dikarenakan adanya regulasi kewajiban jamaah umroh melakukan vaksinasi Meningitis dan Polio berdasarkan surat edaran nomor HK.02.02/A/3717/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan HK.02.02/A/1206/2025 tanggal 25 April 2025 yang menetapkan bahwa vaksinasi meningitis meningokokokus dan Polio wajib bagi semua jamaah umrah yang berangkat ke Arab Saudi. Kebijakan ini mengikuti pembaruan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang mencantumkan vaksin meningitis sebagai salah satu syarat kesehatan untuk jamaah umrah. Selain vaksin meningitis dan polio, BKK Kelas I Bandung juga menyediakan vaksin lain yaitu vaksin Flu dan Typhoid sehingga mulai tahun 2025 terjadi peningkatan pendapatan jasa pemberian vaksinasi kesehatan di BKK Kelas I Bandung.

Penurunan tajam terjadi pada Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp210.790.001 (- 44,27%). Ini menunjukkan adanya penurunan volume pasien atau layanan pemeriksaan kesehatan di luar vaksinasi dibandingkan tahun 2024. Begitu pula terjadi pada Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan relatif stabil meski turun sebesar Rp34.680.000.

Penurunan pada Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 56.933.600 (-86,92%) bersifat wajar karena pendapatan dari lelang/penghapusan aset bukan merupakan pendapatan rutin operasional. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada bulan September 2025 sebesar Rp 8.566.400 berdasarkan risalah lelang nomor 533/08.01/2025-01 tanggal 9 September 2025 .

Pada bulan Januari 2025 terdapat tambahan pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja (TAYL) dengan total nominal Rp1.018.811 (Gabungan Barang dan Pegawai). Meski kecil secara nominal, ini menunjukkan adanya hasil dari proses audit atau kelebihan pembayaran yang dikembalikan ke kas negara pada tahun 2025. Penerimaan dari pendapatan non layanan yaitu penerimaan kembali belanja pegawai TAYL berupa pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2024 Rp 397.211 dan penerimaan kembali belanja barang TAYL berupa kelebihan pembayaran internet di wilayah kerja Patimban Subang Rp 621.600 sehingga menambah PNBPK BKK Kelas I Bandung di periode ini. Struktur PNBPK BKK saat ini sangat bertumpu pada satu layanan saja, yaitu vaksinasi, yang menyumbang 89,15% dari total pendapatan Rp 7.690.070.000 dari Rp 8.625.740.211.. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8.625.740.211	7.942.900.001	8,60
Jumlah	8.625.740.211	7.942.900.001	8,60

Sedangkan Rincian PNBPK Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPK Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	397.211	-	-
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	265.380.000	476.170.001	(44,27)
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	660.705.000	695.385.000	(4,99)
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	7.690.070.000	6.705.845.000	14,68
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	621.600	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.566.400	65.500.000	(86,92)
Jumlah	8.625.740.211	7.942.900.001	8,60

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp21.852.217.879 atau 77,76 % dari anggaran belanja sebesar Rp.28.103.396.000 (Pagu sebelum blokir). namun apabila menggunakan realisasi pagu efektif sudah mencapai 99,64% dari pagu efektif (setelah di blokir) Rp 21.932.401.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

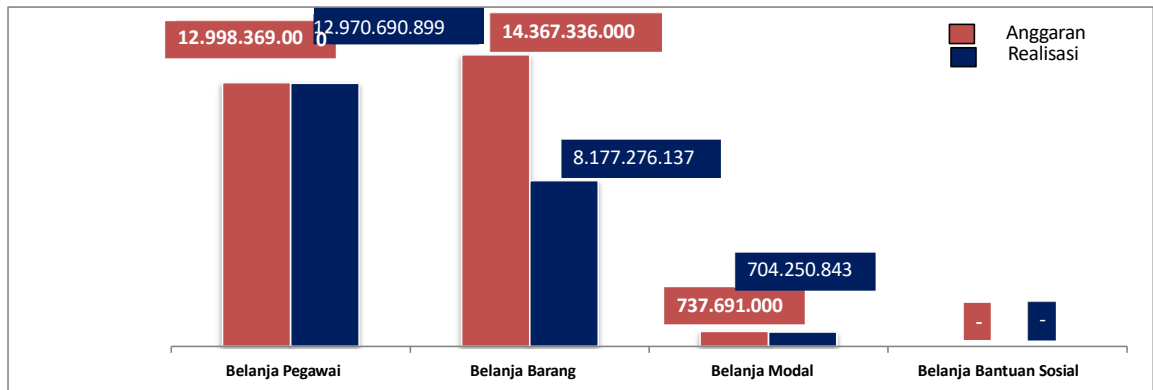
U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	12.998.369.000	12.970.690.899	99,79
Belanja Barang	14.367.336.000	8.177.276.137	56,92
Belanja Modal	737.691.000	704.250.843	95,47
Jumlah	28.103.396.000	21.852.217.879	77,76

Rincian anggaran dan Realisasi Anggaran menggunakan pagu efektif TA 2025

Uraian	2025				Capaian %
	Anggaran	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	
Belanja Pegawai	12.998.369.000	-	12.998.369.000	12.971.260.923	99.79
Belanja Barang	14.367.336.000	6.170.995.000	8.196.341.000	8.178.605.261	99.78
Belanja Modal	737.691.000	-	737.691.000	704.250.843	95.47
TOTAL	28.103.396.000	6.170.995.000	21.932.401.000	21.854.117.027	99.64

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 21,13% Total belanja pegawai meningkat 7,8%.

- Pertumbuhan PPPK: Terjadi lonjakan beban gaji pokok PPPK sebesar 57,8% (dari Rp383 juta menjadi Rp605 juta). Hal ini diikuti kenaikan signifikan pada uang makan PPPK 62,1% dan tunjangan keluarga PPPK.
- Tunjangan Kinerja: Belanja Tunjangan Khusus/Kinerja (akun 512414) naik tajam sebesar 59,67% menjadi Rp811.200.280.
- Efisiensi Lembur PNS: Berhasil ditekan sebesar 13,44% menjadi Rp375.332.000.
- Gaji PNS: Relatif stabil dengan kenaikan tipis pada gaji pokok sebesar 1,4%.

Peningkatan signifikan pada beban PPPK menunjukkan penguatan personil non-PNS di lingkungan BKK Bandung.

Berbanding terbalik dengan belanja pegawai, belanja barang mengalami penurunan total yang sangat signifikan akibat dari pembatasan pagu yang diblokir sebesar Rp 6.170.995.00, penurunan belanja barang dari Rp 13.215.042.631 miliar menjadi Rp8.177.276.137.

- Penurunan Drastis Perjalanan Dinas: Belanja Perjalanan Dalam Negeri turun tajam lebih dari 60%, dari Rp3,86 miliar menjadi Rp1,41 miliar.
- Belanja Jasa: Mengalami penurunan dari Rp4,91 miliar menjadi Rp3,85 miliar.
- Belanja Barang Non-Operasional: Turun secara signifikan dari Rp1,43 miliar menjadi Rp415,4 juta.
- Belanja Pemeliharaan: Relatif stabil dengan sedikit penurunan menjadi Rp1,30 miliar.

- Persediaan Barang Konsumsi: Satu-satunya akun belanja barang yang mengalami kenaikan menjadi Rp234,8 juta.

Kebijakan Penghematan sebagai alasan utama Penurunan tajam pada belanja barang (terutama perjalanan dinas dan operasional) menunjukkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sangat ketat di tahun 2025.

Sedangkan pada realisasi Belanja Modal tahun 2025 tercatat sebesar Rp704.250.843, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp2.461.580.000

Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	12.970.690.899	12.029.470.077	7,82
Belanja Barang	8.177.276.137	13.215.042.631	(38,12)
Belanja Modal	704.250.843	2.461.580.000	(71,39)
Jumlah	21.852.217.879	27.706.092.708	(21,13)

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp12.970.690.899*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.970.690.899 dan Rp12.029.470.077. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.802.486.100	3.748.323.400	1,44
Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.692	56.772	(0,14)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	269.771.640	262.087.350	2,93
Belanja Tunj. Anak PNS	84.289.678	84.418.348	(0,15)
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	453.172.000	412.554.000	9,85
Belanja Tunj. PPh PNS	29.815.924	31.770.752	(6,15)
Belanja Tunj. Beras PNS	202.776.000	204.876.180	(1,03)

Belanja Uang Makan PNS	518.058.000	437.805.000	18,33
Belanja Tunjangan Umum PNS	28.305.000	36.630.000	(22,73)
Beban Gaji Pokok PPPK	605.588.252	383.783.400	57,79
Beban Pembulatan Gaji PPPK	10.647	6.155	72,98
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	35.690.372	22.115.720	61,38
Beban Tunjangan Anak PPPK	10.857.706	6.367.128	70,53
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	60.793.748	37.470.000	62,25
Beban Tunjangan Beras PPPK	36.276.385	22.450.200	61,59
Beban Uang Makan PPPK	105.118.000	64.839.000	62,12
Belanja Uang Lembur	375.332.000	433.633.000	(13,44)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.436.723.499	5.235.305.613	3,85
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kiner	811.200.280	508.057.969	59,67
Belanja Uang Lembur PPPK	79.739.000	71.722.000	11,18
Jumlah Belanja kotor	12.971.260.923	12.029.471.987	-
Pengembalian Belanja Pegawai	570.024	1.910	29.744,19
Jumlah Belanja	12.970.690.899	12.029.470.077	-

Pada Belanja Pegawai kenaikan terjadi pada :

Komponen Gaji dan Tunjangan PNS

1. Belanja Gaji Pokok PNS naik 1,4% disebabkan adanya kenaikan gaji berkala dan perubahan jabatan menjadi jabatan fungsional tertentu sebanyak 4 orang .
2. Belanja tunjangan fungsional naik 9.85% dikarenakan perubahan beberapa pegawai jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu dan diikuti adanya kenaikan jenjang pada jabatan fungsional tertentu.
3. Belanja uang makan mengalami kenaikan 18,33% disebabkan karena adanya efisiensi belanja barang perjalanan dinas dengan memaksimalkan kegiatan PNS dilakukan secara daring sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kehadiran pegawai. Selain itu juga adanya penambahan CPNS sebanyak 5 orang dimana belanja uang makannya saja yang sudah dibayarkan di BKK Kelas I Bandung.
4. Belanja Tunjangan Kinerja mengalami kenaikan 3,85% akibat adanya kenaikan jenjang pada jabatan fungsional.

Belanja untuk PNS tidak mengalami perubahan drastis walau terdapat penambahan CPNS sebanyak 5 orang, yang mengindikasikan jumlah personil tetap atau pertumbuhan alami (kenaikan pangkat/berkala).

Komponen Gaji dan Tunjangan PPPK

1. Belanja Komponen gaji pokok PPPK mengalami kenaikan 57,8% karena adanya penambahan PPPK sebanyak 11 orang sehingga berkontribusi dalam kenaikan belanja pegawai lebih banyak di TA 2025 ini.
2. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK naik 63,42% karena efek penambahan PPPK
3. Belanja Tunjangan Kinerja mengalami kenaikan 59,67% sejalan dengan penambahan PPPK
4. Belanja Uang Makan mengalami kenaikan 62,12% sejalan dengan penambahan jumlah personil PPPK di tahun 2025

Sedangkan penurunan belanja pegawai terjadi pada:

1. Belanja lembur PNS dikarenakan adanya efisiensi langganan daya dan jasa
2. Belanja Tunjangan Anak dikarenakan adanya perubahan KP4 anak yang sudah tidak menjadi tanggungan
3. Belanja Tunjangan Umum dikarenakan adanya 4 orang pegawai berpindah perpindahan JFU ke JFT

Terdapat pengembalian belanja pegawai pada tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS an H. Eddy Harianto Rp 570.000, karena yang bersangkutan mendapatkan kekurangan gaji tunjangan fungsional bulan Juni sd Agustus 2025 sehingga Tunjangan umum yang sudah didapat dibulan tersebut harus dikembalikan (Rp 190.000 x 3 bulan) (SPM No 00235T/415712/2025 tanggal 22-08-2025)
2. Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Kekurangan Gaji bulan Mei sd Agustus 2025 an.Tukitno Rp 24 (SPM No 00229T/415712/2025 tanggal 13-08-2025)

*Realisasi Belanja
Barang
Rp8.177.276.137*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.177.276.137 dan Rp13.215.042.631. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 38,12% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Realisasi belanja barang pada periode ini mengalami penurunan signifikan karena Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan adanya pagu blokir sebesar Rp 6.170.995.000 . Kenaikan realisasi belanja hanya terjadi pada belanja barang persediaan konsumsi saja yang terdiri dari:

- belanja barang persediaan konsumsi mengalami kenaikan karena realisasi belanja berupa bahan pendukung dan APD kegiatan haji, faktor risiko lingkungan, surveilans kegiatan Embarkasi Haji 2025 yang dilaksanakan mulai tgl 1 Mei 2025

Sedangkan penurunan signifikan terjadi hampir disemua jenis belanja barang pada tahun ini, terdiri dari:

- belanja barang operasional berupa perlengkapan perkantoran, honor operasional, pengiriman pos, uang lembur PPNPN dan beban operasional lainnya mengalami penurunan bahkan dihilangkan karena di efisiensi
- belanja barang non operasional mengalami penurunan pada belanja bahan bersifat rapat sosialisasi dihilangkan diganti dengan daring, bahan cetak media kie di hilangkan dan peralatan mesin ekstrakomptabel di efisiensi
- belanja jasa pada langganan daya jasa listrik, air dan telepon mengalami penurunan karena dilakukan penghematan penggunaan dengan adanya WFA (work from anywhere).
- belanja jasa pada jasa outsource mengalami efisiensi anggaran dan pengurangan personil petugas outsource
- belanja jasa pada penyelenggaraan diklat dan sewa mobil dihilangkan dari anggaran beralih ke daring untuk diklat
- belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas dilakukan efisiensi anggaran

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	964.086.909	1.417.193.073	(31,97)
Belanja Barang Non Operasional	415.440.762	1.435.623.592	(71,06)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	234.860.240	222.876.076	5,38
Belanja Jasa	3.850.129.589	4.914.273.937	(21,65)
Belanja Pemeliharaan	1.303.616.065	1.361.100.938	(4,22)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.410.471.696	3.864.920.015	(63,51)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	8.178.605.261	13.215.987.631	(38,12)
Pengembalian Belanja	1.329.124	945.000	40,65
Jumlah Belanja	8.177.276.137	13.215.042.631	(38,12)

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp704.250.843 dan Rp2.461.580.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 71,39% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh terdapat kenaikan belanja Modal yang terdiri dari:

- PC Desktop, PC All in One dan Tablet BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 240.984.220
- Rapid Scanner BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 15.226.623
- Laptop editing dan printer scanner A3 BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 62.604.000
- LED TV BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 44.000.000
- Laptop office dan Printer Scanner A4 BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 341.436.000.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704.250.843	2.461.580.000	(71,39)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	704.250.843	2.461.580.000	(71,39)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	704.250.843	2.461.580.000	(71,39)

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh Tidak ada belanja modal tanah tahun ini.

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp704.250.843 dan Rp2.461.580.000, mengalami penurunan sebesar 71,39 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh

Penurunan Anggaran Belanja Modal dan otomatis Realisasi Belanja Modal tahun ini juga menurun. Pada DIPA awal belanja modal belum dianggarkan namun dengan adanya optimalisasi belanja bersumber PNBPN yang baru dilakukan bulan Oktober 2025, sehingga belanja peralatan dan mesin baru terealisasi di bulan November dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA
2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704.250.843	2.461.580.000	(71,39)
Jumlah Belanja Kotor	704.250.843	2.461.580.000	(71,39)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	704.250.843	2.461.580.000	(71,39)

*Realisasi Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp0*

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari tidak ada anggaran dan realisasi belanja modal dan gedung periode ini.

*Realisasi Belanja
Modal, Jalan,
Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran dan realisasi belanja modal dan gedung periode ini.

B.2.3.4 Catatan lainnya LRA

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025- 2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung memiliki tujuan strategis yaitu terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100%. Pada BKK Kelas I Bandung melaksanakan PN sesuai RPJMN 2025 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Pengendalian Faktor Risiko penyakit Pelabuhan dan Bandara,
2. Sosialisasi dan Diseminasi,
3. Layanan pengendalian Lingkungan,
4. Layanan Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS,
5. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria, PES, DBD,
6. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD, Diare,
7. Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan Kesehatan,
8. Pelatihan Kesehatan,
9. Pelayanan Kesehatan Haji

melalui kegiatan prioritas yang terdapat pada BKK Kelas I Bandung yang tersebar di 5 wilayah kerja dan 1 pos Bandara, dengan pagu mencapai Rp 6.949.809.000 dan realisasi sebesar Rp2.787.563.650. atau 40.11%. Realisasi rendah karena terdapat pagu yang di blokir sebesar Rp 4.127.711.000 sehingga pagu efektif yang bisa di belanjakan Rp2.822.098.000 apabila menggunakan anggaran pagu efektif maka realisasi sudah mencapai 98,77% dan Capaian Output mencapai 100% terlaksana.

Rincian kertas kerja capaian output di BKK Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI KINERJA (CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL)
TA 2025**

No	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSpan)			Keluaran (Data Sakti)								GAP**	PN	Keterangan
					Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini					
										RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	DO	4249	PEF001	Sosialisasi dan Diseminasi (HS-29)	66.000.000	-	0	165	orang	0	0	0	165	165	100	100	PN	capaian output tercapai krn berdampingan dengan kegiatan RO lain
2	DO	4249	QAA012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara /Lintas Batas (HS-29)	317.600.000	58.274.119	18,35	1700	Orang	0	11,78	0	1700	1700	100	81,65	PN	Kegiatan sudah rampung di bulan November
3	DO	4249	QAH016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	696.420.000	157.860.724	22,67	16	layanan	7	7,45	8,68	16	16	100	77,33	PN	'- transport kegiatan koordinasi hasil IKL asrama haji Bekasi a.n Sira Elko - Biaya pemeriksaan mikrobiologi air bersih di Bandara Husein Sastranegara, wilker Cirebon, Wilker Indramayu, Wilker Kertajati dan Wilker Patimban - Translok kegiatan pengawasan TPP di semua wilker - Translok kegiatan pengawasan HSBU di semua wilker - Translok kegiatan pengawasan SAB di semua wilker - Monitoring dan evaluasi nyamuk berwolbachia di Kecamatan Kiaracondong - Pembuatan preparat nyamuk - kegiatan pengendalian vektor dan sanitasi pada situasi khusus (nataru)
4	DO	4249	QAH017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	1.470.568.000	359.044.955	24,42	21	layanan	11	5,36	7,07	21	21	100	75,58	PN	"- Surveilans epidemiologi dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk/wilayah di Cirebon (18-19 Desember 2025) petugas ; Liana Rica, Keke, Amanda, Arsy dan Kertajati (23-24 Desember 2025) petugas : Luki, Abdul Latif, Gelar - Pengumpulan data surveilans epidemiologi penyakit di pintu masuk (Pengumpulan data rutin bulanan dari puskesmas) di Cirebon, Indramayu, Kertajati, Patimban, Palabuhanratu (petugas: Yenni R, Teguh, Iman, Muldie, Akmal, Yeni S) dll
5	DO	4249	QAHU04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus (HS-29)	32.000.000	32.000.000	100	20	layanan	7	25	25	20	20	100	0	PN	- layanan faktor resiko pada situasi pelayanan kesehatan posko nataru di Bandara Husein 2 layanan Bandara Kertajati 1 layanan Pelabuhan Cirebon 1 Layanan Palabuhanratu 1 layanan Palabuhan indramayu 1 Layanan Patimban 1 layanan
6	DO	4249	QAHU07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	14.448.000	4.925.800	34,09	12	layanan	0	0	0	12	12	100	65,91	PN	Kegiatan telah rampung tidak ada kegiatan bulan ini

[illegible]

**LAPORAN REALISASI KINERJA (CAPAIAN OUTPUT NON PRIORITAS NASIONAL)
TA 2025**

No	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)								GAP**	PN	Keterangan
					Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini					
										RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	WA	4815	EBA956	Layanan BMN	18.382.000	1.678.500	9,13	2	Layanan	0	0	0	2	2	100	90,87	Non PN	Penyusunan Laporan BMN Tahunan 2025
2	WA	4815	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	7.120.000	-	0	3	Layanan	0	0	0	3	3	100	100	Non PN	Kegiatan Peningkatan Pegawai Terkait Kehumasan dengan Kantor Imigrasi Bandung
3	WA	4815	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	11.240.000	530.000	4,72	4	Layanan	0	28,72	0	4	4	100	95,28	Non PN	Monitoring dan Evaluasi Penerapan NSPK Manajemen ASN di Lingkungan BKK Kelas I Bandung
4	WA	4815	EBA962	Layanan Umum	281.120.000	210.611.474	74,92	6	Layanan	1	12,55	6,49	6	6	100	25,08	Non PN	Kegiatan Pencetakan Stiker dan Media KIE Berhias, Satu Sehat, CKG serta Pembayaran Langganan Internet Pos dan Wilayah Kerja
5	WA	4815	EBA963	Layanan Data dan Informasi	5.600.000	-	0	2	Layanan	1	100	49	2	2	100	100	Non PN	Kegiatan Rapat Penyusunan Profil Tahun 2025
6	WA	4815	EBA994	Layanan Perkantoran	20.422.197.000	18.832.138.903	92,21	13	Layanan	2	13,68	9,65	13	13	100	7,79	Non PN	Realisasi Gaji Bulan Desember, Tukin, uang makan dan Lembur bulan November dan Desember serta Kegiatan Operasional Perkantoran Tahun 2025
7	WA	4815	EBC954	Layanan Manajemen SDM	7.814.000	-	0	4	Orang	0	13,3	0	4	4	100	100	Non PN	Monitoring dan Evaluasi Penerapan NSPK Manajemen ASN di Lingkungan BKK Kelas I Bandung
8	WA	4815	EBC996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	28.414.000	465.000	1,64	5	Orang	0	97,95	0	5	5	100	98,36	Non PN	Tidak ada Kegiatan di Bulan Desember
9	WA	4815	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	141.874.000	-	0	2	Dokumen	0	22,05	0	2	2	100	100	Non PN	Kegiatan Pembahasan Penetapan Distribusi Pagu Penguatan dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026
10	WA	4815	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	81.360.000	-	0	10	Dokumen	2	17,7	4,56	10	10	100	100	Non PN	"1. Rapat Evaluasi Capaian Realisasi Ditjen P2 Bulan Desember 2025 2. Pertemuan Monitoring evaluasi Capaian Indikator dan Rincian Output TW 4 Tahun 2025 "
11	WA	4815	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	110.871.000	14.096.500	12,71	7	Dokumen	0	12,87	0	7	7	100	87,29	Non PN	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cortax dan Prosedur Pembayaran Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying, Penihilan UP dan TUP, Rapat Monitoring Evaluasi Anggaran, Rekonsiliasi KPPN

[illegible]

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Tidak ada pengembalian belanja UP di tahun 2025

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak ada penyimpanan uang tunai maupun di rekening bank karena pembayaran PNBPN melalui Kantor POS yang berada di pelayanan BKK Kelas I Bandung

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak

Tidak ada kas lainnya atau setara kas

Persediaan
Rp1.209.910.446

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.209.910.446 dan Rp1.186.380.844. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	150.063.323	923.814.277
Persediaan Lainnya	1.059.847.123	262.566.567
Bahan Baku	-	-
Jumlah	1.209.910.446	1.186.380.844

Mutasi Persediaan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	1.186.380.844
Mutasi tambah:	
Pembelian	236.610.240
Reklasifikasi Masuk	5.518.675
Transfer masuk	5.212.306.363
Mutasi Kurang:	
Transfer keluar	858.368.960
reklas ke aset	115.200.000
penggunaan persediaan	5.168.946.182
transfer keluar	135.364.800
reklasifikasi keluar	5.518.675
rusak	1.453.977
Saldo per 31 Desember 2025	1.209.910.446

Persediaan tersebut di atas dalam Pada akhir 31 Desember 2025 ini terdiri dari barang konsumsi dan persediaan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Barang Konsumsi	
Alat Tulis	313.500
Tinta Tulis, Tinta Stempel	20.000
Penjepit Kertas	452.600
Ordner Dan Map	450.000
Staples	150.000
Isi Staples	126.600
Barang Cetak	60.369.872
Alat Tulis Kantor Lainnya	265.900

Kertas HVS	1.070.000
Amplop	90.000
Pita Printer	3.762.456
Tinta/Toner Printer	7.781.573
Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	21.803.453
Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	38.911.120
Obat Cair (Barang Konsumsi)	1.824.631
Obat Padat (Barang Konsumsi)	4.928.813
Obat Gas (Barang Konsumsi)	340.046
Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	389.557
Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	219.311
Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	326.640
Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.467.251
Jumlah	150.063.323
Persediaan Lainnya	
Obat Cair (Persediaan Lainnya)	1.051.621.835
Obat Padat (Persediaan Lainnya)	1.986.392
Obat Gas (Persediaan Lainnya)	1.750.000
Obat Serbuk/Tepung (Persediaan Lainnya)	189.924
Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	4.298.972
Jumlah	1.059.847.123
TOTAL	1.209.910.446

Terdapat persediaan rusak dan usang sebesar Rp 5.876.019 , yang terdiri dari:

Persediaan Rusak

U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH PER 31-12-2025
Barang Cetak	14	102.108
Buku Kesehatan Kapal	13	6.975
Buku_ICV 2024	1	11.433
Obat Cair (Barang Konsumsi)	2	619.824
Vaksin Yellow Fever Tahap 3	2	309.912
Obat Cair (Persediaan Lainnya)	4	407.860
Vaksin Meningitis Meningokokus tahap 4	4	101.965
Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	5	324.185
Paket jamaah tahun 2025	5	64.837
Total	25	1.453.977

Persediaan Usang

U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH PER 31-12-2025
Obat Cair (Barang Konsumsi)	160	1.822.599
OBH 100 ml IKA	5	14.680
Erlamycetine Ear Drops 1 %	6	12.490
Iodine Povidone Lar 10 % 30 ml	1	6.660
Diphenhydramine Inj	16	4.440
Epinephrine 0.1 % Inj	1	3.197
Epinephrine 0.1 % Inj	12	5.342
Atropin Sulf 0.25 mg	9	4.579
Asering 500 ml	4	44.266
Ringer Lactat Infus 500 ml	7	11.047
Atropin Sulf 0.25 mg Amp @ 100	17	6.938
Combivent 2.5 ml UDV 205	10	29.090
Cortidex Inj @ 10	20	9.089
Diphenhydramine 10 mg/ml	20	4.163
Diphenhydramine 10 mg/ml	3	4.329
Ketorolac 10 mg inj amp @12	2	3.244
Ringer Lactat _ Infus 500 ml	11	10.623
Sodium Chloride _0,9% 500 ml	16	26.465
Obat Padat (Barang Konsumsi)	2.478	1.993.527
Cetirizine Tab 10 mg	6	601
Salbutamol Tab 2 mg	60	142
Neoremacyl	1	48.900
Ambroxol 30 mg	50	562
Allopurinol 100 mg	220	478
Amlodipine 10 mg	118	500
Antimo Dewasa	13	661
Betahistine	24	1.118
Dexamethasone 0.5 mg	3	123
Glimepiride 2 mg	100	971
Irbesartan 150 mg	30	4.218
Spasminal	20	1.266
Amlodipine 10 mg @50 tab	12	105
Antasida Doen	48	520
Loratadine 10 mg	58	403
Neurodex Drag	12	848
Piroxicam 20 mg	10	310
Simvastatin 20 mg	175	454
Simvastatin 20 mg	2	454

Ibuprofen 400 mg tab	15	394
Ranitidin 150 mg @100 tab	30	463
Ranitidin 150 mg @100 tab	66	416
Amoxycillin 500 mg tab @100	200	1.879
Dimenhydrinate 50 mg (dus 100 tab)	249	212
Domperidone 10 mg tab @1000 GDX	98	529
Irbesartan 150 mg tab @50	20	3.220
Adalat Oros 30 mg @30	10	12.434
Cedocard 10 mg	10	2.231
Nitrokaf Retard Cap	10	2.084
Amoxycillin_500 mg	58	1.134
Aciclovir 400 mg	100	1.441
Betahistin 6 mg	9	1.291
Metformin_500 mg	235	348
Neurodex_drag	128	764
Paracetamol_500_mg	47	540
Paracetamol_500_mg	72	778
Ranitidin_150 mg	70	354
Ranitidin_150 mg	64	500
Simvastatin_20_mg	23	472
Acyclovir 400 mg tab @50	2	1.294
Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	76	191.596
Salicyl KF Plus Menthol 50 gr	6	13.966
Cefadroxil_500 mg	70	1.540
Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	36	297.420
Betametasone CR 5 g	8	3.076
Gentamycin 0.1 %	2	4.113
Chloramfecort H Cream	5	16.882
Bioplacenton Jelly	1	31.968
Thrombopop gel (nordmark)	1	74.231
Betametasone_0,1 % CR	6	3.418
Gentamycin 0.1%	13	4.113
Obat Cair (Persediaan Lainnya)	4	132.566
NaCl 0,9 % 500 ml	2	5.222
NaCl 0,9 % 500 ml	1	5.222
Vaksin Influenza (FLUBIO)	1	116.900
Total	2.754	4.437.708

Terdapat ketidaksesuaian pada hasil laporan persediaan rusak dimana Obat Cair Persediaan lainnya terdiri dari NaCl 0,9 % 500 ml sebanyak 3 botol Rp 15.666 yang

seharusnya sudah hilang dari laporan persediaan rusak namun masih muncul. sedangkan pada neraca sudah sesuai dan tidak ada perbedaan. Sudah ditindaklanjuti mengirim tiket ke HAIDJKN Kementerian Keuangan dengan nomor tiket #20250618-9TBM9A tgl 18 juni 2025 dan masih dalam proses tindak lanjut.

Tanah

Rp38.455.235.600

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp38.455.235.600 dan Rp38.455.235.600. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	38.455.235.600
Saldo per 31 Desember 2025	38.455.235.600

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	200m2	Kec. Kedawung Kel. Sutawinangun Cirebon	570.055.000
2	528 m2	Jl. Jend. Sudirman Indramayu	2.254.230.000
3	1000 m2	Jl. Sekar Kemuning Cirebon	3.685.678.000
4	1626 m2	Jl. Kupuh puyuh Majalengka	1.138.665.000
5	1060 m2	Jl. Empang Raya Palabuhan Ratu	2.360.355.000
6	780 m2	Jl Cikapayang Bandung	26.123.370.000
7	779 m2	Desa Mundusari Kec Pamanukan Kab Subang	2.322.882.600
Jumlah			38.455.235.600

Semua tanah dikuasai oleh satker tidak ada penyewaan tanah.

Peralatan dan Mesin

Rp43.182.042.326

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp43.182.042.326 dan Rp43.220.960.443. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	43.220.960.443
Mutasi tambah:	

Pembelian	704.250.843
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	115.200.000
Koreksi Perubahan Kondisi	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	858.368.960
Saldo per 31 Desember 2025	43.182.042.326
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(38.599.604.470)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.582.437.856

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Terdapat pembelian belanja modal peralatan mesin pada periode ini dan terdapat reklasifikasi masuk dari persediaan yang terdiri dari:

- Oxygen Therapy sebanyak 10 buah senilai Rp 115.200.000
- PC Desktop, PC All in One dan Tablet BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 240.984.220
- Rapid Scanner BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 15.226.623
- Laptop editing dan printer scanner A3 BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 62.604.000
- LED TV BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 44.000.000
- Laptop office dan Printer Scanner A4 BKK Kelas I Bandung TA 2025 Rp 341.436.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Merupakan penghentian penggunaan aset:
- Penghentian penggunaan aset 1 unit Ambulance KIA Travello tahun 2007 senilai Rp 253.790.400
- Penghentian penggunaan aset Alat Kesehatan lainnya Rp 604.578.560

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp29.429.070.250*

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.429.070.250 dan Rp29.429.070.250. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	29.429.070.250
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	29.429.070.250
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.809.014.429)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	24.620.055.821

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada penambahan dan pengurangan mutasi

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp683.893.440

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.683.893.440 dan Rp.683.893.440. Tidak ada Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp43.532.340.026

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp43.532.340.026 dan Rp42.205.923.109. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi

Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	43.182.042.326	(38.599.604.470)	4.582.437.856
2	Gedung dan Bangunan	29.429.070.250	(4.809.014.429)	24.620.055.821
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	683.893.440	(123.721.127)	560.172.313
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		73.295.006.016	(43.532.340.026)	29.762.665.990

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp168.580.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berupa Software si Abah Jawara sudah dihapuskan karena sudah tidak digunakan.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp237.363.859*

C.12 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp237.363.859 dan Rp336.895.487. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	237.363.859	(336.895.487)
Total	237.363.859	(336.895.487)

Pada tahun 2025 terdapat Dana yang di batasi penggunaannya merupakan RPATA yang sudah rampung kontraknya pada akhir tahun dengan SP2D yang terbit tanggal 2 Januari 2026 Terdapat 5 SP2D Pembayaran untuk tagihan kontraktual termin akhir. Rinciannya sebagai berikut:

1. Nomor 269991302000543 Pembayaran Pengadaan Jasa Internet Service Provider Kantor Induk BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin akhir/8 sesuai BAST Nomor BJ.01.04/8.1/911/2025 Tanggal 31-12-2025
2. Nomor 269991302000542 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengemudi BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/909/2025 Tanggal 31-12-2025
3. Nomor 269991302000134 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Cleaning Service BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/917/2025 Tanggal 31-12-2025
4. Nomor 269991302000133 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengamanan BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/915/2025 Tanggal 31-12-2025
5. Nomor 269991302000132 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga IT, Resepsionis dan Adminitrasi BKK Kelas I Bandung TA 2025 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/919/2025 Tanggal 31-12-2025

Aset Lain-lain
Rp2.852.894.619

C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.852.894.619 dan Rp2.399.510.969.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	2.399.510.969
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	858.368.960
Mutasi Kurang:	
Pencatatan barang yang mau di hapuskan	404.985.310
Saldo per 31 Desember 2025	2.852.894.619
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(2.852.894.619)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

Merupakan Reklasifikasi dari asset tetap ke Aset Tetap terdiri dari:

- 1 unit Ambulance KIA Travello tahun 2007 senilai Rp253.790.400
- Peralatan Kesehatan lainnya senilai Rp604.578.560

Mutasi Kurang

peralatan dan mesin yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yaitu pencatatan barang yang mau dihapuskan dengan total Rp 404.985.310 terdiri dari:

1. CCTV sebanyak 11 buah senilai Rp 25.640.150
2. Kursi besi/metal sebanyak 20 buah senilai Rp 22.061.160
3. Kursi Kayu sebanyak 20 buah senilai Rp 66,290,000
4. Sice sebanyak 3 buah senilai Rp 9.540.000
5. AC Split sebanyak 7 buah senilai Rp 29.095.000
6. Faximile sebanyak 1 buah senilai Rp 197.000
7. Notebook sebanyak 16 buah senilai Rp 235.167.000
8. Printer sebanyak 3 buah senilai Rp 16.995.000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 2.852.894.619*

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.852.894.619 dan Rp2.568.090.969. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	2.852.894.619	(2.852.894.619)	-
Total	2.852.894.619	(2.852.894.619)	-

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp276.552.457*

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp276.552.457 dan Rp389.530.944. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	237.363.859	336.895.487
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	39.188.598	52.635.457
Total	276.552.457	389.530.944

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang pada pihak ketiga terdiri dari 2 jenis beban yang terdiri dari:

1. Utang kepada pihak lainnya berupa RPATA jasa kontraktual yang telah selesai kewajibannya di tanggal 31 Desember 2025 namun baru terbit SP2D nya tanggal 2 Januari 2026, terdiri dari:
 - Nomor 269991302000543 Pembayaran Pengadaan Jasa Internet Service Provider Kantor Induk BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin akhir/8 sesuai BAST Nomor BJ.01.04/8.1/911/2025 Tanggal 31-12-2025
 - Nomor 269991302000542 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengemudi BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/909/2025 Tanggal 31-12-2025
 - Nomor 269991302000134 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Cleaning Service BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/917/2025 Tanggal 31-12-2025

- Nomor 269991302000133 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengamanan BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/915/2025 Tanggal 31-12-2025
 - Nomor 269991302000132 Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga IT, Resepsionis dan Adminitrasi BKK Kelas I Bandung TA 2025 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/919/2025 Tanggal 31-12-2025
2. Beban Barang yang masih harus dibayar pada akhir tahun merupakan utang langganan daya dan jasa bulan Desember 2025 yang baru akan dibayar di bulan Januari 2026, terdiri dari:
- Utang langganan listrik Rp 33.526.882
 - Utang langganan Air Rp 808.298
 - Utang langganan Telepon Rp 1.950.000
 - Utang langganan Internet Rp 2.903.418

Ekuitas

Rp69.388.623.438

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.388.623.438. dan Rp70.716.982.011. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp8.616.155.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.616.155.000 dan Rp7.877.400.001. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,38. Hal tersebut disebabkan oleh Pada periode ini terjadi kenaikan PNBPN yang signifikan dibanding tahun lalu.

Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan HK.02.02/A/1206/2025 tanggal 25 April 2025 yang menetapkan bahwa vaksinasi meningitis meningokokus dan Polio wajib bagi semua jemaah umrah yang berangkat ke Arab Saudi. Kebijakan ini mengikuti pembaruan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang mencantumkan vaksin meningitis sebagai salah satu syarat kesehatan untuk jemaah umrah. Selain vaksin meningitis dan polio, BKK Kelas I Bandung juga menyediakan vaksin lain yaitu vaksin Flu dan Typhoid sehingga mulai tahun 2025 ada peningkatan pendapatan jasa pemberian vaksinasi kesehatan di BKK Kelas I Bandung.

Penurunan tajam terjadi pada Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 210.790.001 (- 44,27%). Ini menunjukkan adanya penurunan volume pasien atau layanan pemeriksaan kesehatan di luar vaksinasi dibandingkan tahun 2024. Begitu pula terjadi pada Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan relatif stabil meski turun sebesar Rp 34.680.000. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	265.380.000	476.170.001,00	(44,27)
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	660.705.000	695.385.000,00	(4,99)
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	7.690.070.000	6.705.845.000,00	14,68
Jumlah	8.616.155.000,00	7.877.400.001,00	9,38

Sedangkan rincian detail per akun pendapatan sebagai berikut:

	PNBP BKK Kelas I Bandung	Vol	Jumlah
	Jumlah	185.153	8.616.155.000
1.	Jasa Pemeriksaan Kapal dalam Karantina	152	39.730.000

2.	Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal	1.162	233.800.000
3.	Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (<i>Health Book</i>)	144	19.645.000
4.	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal	6.773	356.775.000
5.	Jasa Pemeriksaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan	997	10.755.000
6.	Jasa Pelayanan Kesehatan	175.913	7.953.900.000
7.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Obat, Makanan, Kosmetika,	-	-
	Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif	-	-
8.	Jasa Pemeriksaan Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan	1	1.000.000
	Penyehatan Alat Angkut (Kapal dan Pesawat)	-	-
9.	Jasa Pemeriksaan /Pengawasan dalam rangka Penerbitan	-	-
	Sertifikat Sanitasi, hapus serangga dan hama di Pesawat Udara	-	-
10.	Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan	-	-
	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan atau	-	-
	Restoran di Lingkungan Pelabuhan	-	-
11	Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka	-	-
	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan atau Restoran	-	-
	di Lingkungan Bandar Udara	-	-
12	Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan	-	-
	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga di Lingkungan	-	-
	Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat (PLDB)	-	-
13.	Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan	10	500.000
	Sertifikat Kualitas Air di Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas	1	50.000

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.970.690.899 dan Rp12.029.470.077.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 7,82 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Pada Belanja Pegawai kenaikan terjadi pada :

Komponen Gaji dan Tunjangan PNS

1. Belanja Gaji Pokok PNS naik 1,4% disebabkan adanya kenaikan gaji berkala dan perubahan jabatan menjadi jabatan fungsional tertentu sebanyak 4 orang .
2. Belanja tunjangan fungsional naik 9,85% dikarenakan perubahan beberapa pegawai jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu dan diikuti adanya kenaikan jenjang pada jabatan fungsional tertentu.
3. Belanja uang makan mengalami kenaikan 18,33% disebabkan karena adanya efisiensi belanja barang perjalanan dinas dengan memaksimalkan kegiatan PNS dilakukan secara daring sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kehadiran pegawai. Selain itu pembayaran uang makan CPNS sebanyak 5 orang dibayarkan oleh BKK Kelas I Bandung
4. Belanja Tunjangan Kinerja mengalami kenaikan 3,85% akibat adanya kenaikan jenjang pada jabatan fungsional.
5. Belanja untuk PNS tidak mengalami perubahan drastis (Penggajian induk dan tunjangan CPNS masih di pusat), yang mengindikasikan jumlah personil tetap atau pertumbuhan alami (kenaikan pangkat/berkala).

Komponen Gaji dan Tunjangan PPPK

1. Belanja Komponen gaji pokok PPPK mengalami kenaikan 57,8% karena adanya penambahan PPPK sebanyak 11 orang sehingga berkontribusi dalam kenaikan belanja pegawai lebih banyak di TA 2025 ini.
2. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK naik 63,42% karena efek penambahan PPPK
3. Belanja Tunjangan Kinerja mengalami kenaikan 59,67% sejalan dengan penambahan PPPK

4. Belanja Uang Makan mengalami kenaikan 62,12% sejalan dengan penambahan jumlah personil PPPK di tahun 2025

Sedangkan penurunan belanja pegawai terjadi pada:

1. Belanja lembur PNS dikarenakan adanya efisiensi langganan daya dan jasa. Penurunan ini menunjukkan manajemen beban kerja yang lebih baik sehingga mengurangi ketergantungan pada jam lembur
2. Belanja Tunjangan Anak dikarenakan adanya perubahan KP4 anak yang sudah tidak menjadi tanggungan
3. Belanja Tunjangan Umum dikarenakan adanya 4 orang pegawai berpindah perpindahan JFU ke JFT. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.802.486.100	3.748.323.400	1,44
Beban Pembulatan Gaji PNS	56.668	54.862	3,29
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	269.771.640	262.087.350	2,93
Beban Tunj. Anak PNS	84.289.678	84.418.348	(0,15)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	453.172.000	412.554.000	9,85
Beban Tunj. PPh PNS	29.815.924	31.770.752	(6,15)
Beban Tunj. Beras PNS	202.776.000	204.876.180	(1,03)
Beban Uang Makan PNS	518.058.000	437.805.000	18,33
Beban Tunjangan Umum PNS	27.735.000	36.630.000	(24,28)
Beban Gaji Pokok PPPK	605.588.252	383.783.400	57,79
Beban Pembulatan Gaji PPPK	10.647	6.155	72,98
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	35.690.372	22.115.720	61,38
Beban Tunjangan Anak PPPK	10.857.706	6.367.128	70,53
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	60.793.748	37.470.000	62,25
Beban Tunjangan Beras PPPK	36.276.385	22.450.200	61,59
Beban Uang Makan PPPK	105.118.000	64.839.000	62,12
Beban Uang Lembur	375.332.000	433.633.000	(13,44)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.436.723.499	5.235.305.613	3,85
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	811.200.280	508.057.969	59,67
Beban Uang Lembur PPPK	79.739.000	71.722.000	11,18
Jumlah	12.970.690.899	12.029.470.077	7,82

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.168.946.182 dan Rp6.011.608.997

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 14,02 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh - Beban Persediaan Konsumsi:

Mengalami penurunan tajam sebesar 32,74%. Penurunan sebesar Rp463.710.806 ini mengindikasikan efisiensi yang sangat baik dalam penggunaan bahan habis pakai atau barang konsumsi kantor. Penurunan beban persediaan konsumsi membuktikan bahwa penggunaan alat tulis kantor (ATK) dan barang habis pakai lainnya dilakukan dengan lebih selektif.

- Beban Persediaan lainnya:

Mengalami penurunan sebesar 8,25%. Meskipun persentase penurunannya lebih kecil dibanding barang konsumsi, komponen ini tetap menyumbang efisiensi nominal sebesar Rp378.952.009.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	952.659.628	1.416.370.434	(32,74)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	4.216.286.554	4.595.238.563	(8,25)
Jumlah Beban Persediaan	5.168.946.182,00	6.011.608.997	(14,02)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.214.881.277 dan Rp7.770.503.796.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 32,89 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Secara keseluruhan, jumlah beban barang dan jasa mengalami penurunan signifikan sebesar Rp2.555.622.519 atau

turun 32,89%. Kenaikan beban barang dan jasa di alami oleh beberapa beban sebagai berikut:

1. Beban Honor Operasional Satuan kerja terjadi kenaikan 24% karena adanya perubahan perhitungan honor berdasarkan PMK Nomor 39 tahun 2024 tentang Satuan Biaya Masuk dimana tidak ada pemotongan 60% bagi Jabatan Fungsional keuangan namun sudah dilakukan penghitungan sesuai SBM
2. Beban Barang Non Operasional lainnya terjadi kenaikan 5% karena kegiatan bersumber SBK sedikit lebih banyak tahun ini berupa kegiatan pengendalian faktor Risiko lingkungan
3. Beban langganan telepon naik 30% karena adanya penambahan hotline di Posko Bandara Husein dan BJIB Kertajati Majalengka

Sedangkan penurunan hampir di semua beban barang dan jasa hal ini di akibatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga satuan kerja untuk melakukan penghematan, sehingga akibatnya adalah penurunan alokasi atau realisasi beban barang jasa (Belanja Barang) pada BKK Kelas I Bandung. Penurunan beban bahan dan jasa lainnya secara masif mengindikasikan perbaikan proses bisnis atau pengurangan kegiatan yang bersifat material- intensif. Penurunan beban listrik, air, dan sewa menunjukkan pengelolaan gedung dan utilitas yang lebih terkontrol.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	811.117.741	1.163.553.372	(30,29)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.631.168	5.915.564	(55,52)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144.600.000	116.482.500	24,14
Beban Barang Operasional Lainnya	5.738.000	131.334.407	(95,63)
Beban Bahan	392.112.762	1.352.868.007	(71,02)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.405.000	2.807.370	(14,33)
Beban Langganan Listrik	415.791.750	615.672.958	(32,47)
Beban Sewa	65.688.002	136.033.548	(51,71)
Beban Jasa Profesi	-	9.000.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	3.159.656.526	4.114.493.242	(23,21)
Beban Langganan Telepon	32.614.540	24.531.890	32,95

Beban Langganan Air	14.274.163	17.862.723	(20,09)
Beban Honor Output Kegiatan	-	3.000.000	(100,00)
Jumlah	5.214.881.277	7.770.503.796,00	(32,89)

Beban
Pemeliharaan
Rp1.301.866.065

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp1.301.866.065 dan Rp1.361.100.938.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4,35 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh - Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan menurun 21,78% dari tahun lalu karena anggaran diefisiensi dibanding tahun lalu

- Beban Pemeliharaan peralatan mesin anggaran terjadi kenaikan 3,02% dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa peralatan dan mesin yang membutuhkan pemeliharaan berupa perbaikan.

Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran adalah penyebab utama yang menginstruksikan satuan kerja untuk melakukan penghematan, sehingga akibatnya adalah penurunan alokasi atau realisasi beban pemeliharaan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	316.621.083	404.768.766	(21,78)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	985.244.982	956.332.172	3,02
Jumlah	1.301.866.065	1.361.100.938	(4,35)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.410.471.696

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp1.410.471.696 dan Rp3.864.706.515

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 63,50 persen disebabkan oleh Penurunan beban perjalanan dinas periode ini disebabkan karena adanya pemblokiran dan efisiensi anggaran perjalanan dinas sesuai INPRES Nomor 1 Tahun 2025, surat Menteri Keuangan

Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Sekjen Kemenkes Nomor PR.04.02/C/316/2025 mengenai efisiensi belanja pada satuan kerja.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	1.240.950.696	3.355.994.515	(63,02)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	169.521.000	508.712.000	(66,68)
Jumlah	1.410.471.696,00	3.864.706.515	(63,50)

*Beban Barang
Untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak terdapat Beban Barang Untuk diserahkan kepada masyarakat pada periode ini.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.184.785.877*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.184.785.877 dan Rp2.358.251.766.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.555.697.490	1.729.163.378	(10,03)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	614.385.021	614.385.022	(0,00)

Beban Penyusutan Irigasi	5.557.484	5.557.484	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.145.882	9.145.882	-
Jumah Penyusutan	2.184.785.877	2.358.251.766	(7,36)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	2.184.785.877	2.358.251.766	(7,36)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset
Non Lancar
Rp8.566.400

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.566.400 dan Rp65.500.000. Pada tahun 2025 BKK Kelas I Bandung menyelenggarakan lelang dan menghasilkan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada bulan September 2025 sebesar Rp 8.566.400 berdasarkan risalah lelang nomor 533/08.01/2025-01 tanggal 9 September 2025

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.10 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp-
4.857.208

D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-4.857.208 dan Rp-1.291.388.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	397.211	-	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(5.876.019)	(1.291.388,00)	355,02
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	621.600	-	-
Jumlah	(4.857.208,00)	(1.291.388)	276,12

- Penerimaan Kembali Beban Pegawai TAYL merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang dikembalikan ke kas negara pada tahun 2025 sebesar Rp397.211
- Kerugian Persediaan Rusak/Usang merupakan nilai persediaan rusak dan hilang sebesar Rp -5.876.019
- Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL merupakan kelebihan pembayaran internet di wilayah kerja Patimban bulan Oktober 2024 Rp 621.600 dimana sudah dibayarkan melalui mekanisme SPM PPP operasional.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp70.716.982.011,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.70.716.982.011,00 dan Rp.71.793.261.669,00

Defisit LO

Rp.19.631.777.804,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.19.631.777.804,00 dan Rp.25.454.033.476,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar

Entitas

Rp18.303.419.231

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.18.303.419.231 dan Rp.24.377.753.818. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.852.217.879
Diterima dari Entitas Lain	(8.625.740.211)
Transfer Keluar	(135.364.800)
Transfer Masuk	5.212.306.363
Jumlah	18.303.419.231

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 21.852.217.879, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 8.625.740.211

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp135.364.800 terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Vaksin Yellow Fever	BKK Kendari 200 vial, BKK Cilacap 100 vial, BBKK Tanjung Priok 100	123.964.800
Vaksin Typhus Typhim (Vaksin Tifoid)	BBKK Tanjung Priok 57 vial	11.400.000
Jumlah		135.364.800

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp5.212.306.363 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Vaksin Meningitis 16.320 vial	Dit Surkarkes	1.700.778.000
Vaksin Polio 2.439 vial	Dit Surkarkes	466.146.558
Vaksin Polio 100 vial	BKK Palembang	19.112.200
Emergency Kit 1 paket	Dit. Surkarkes	1.593.960
Tas Kloter haji 2025, paket jemaah haji 2025, Paket obat haji 2025	Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	2.702.708.050
Vaksin Yellow Fever 402 vial	Dit. Surkarkes	124.272.378
BMPH Skrining Kesehatan, Alkohol Swab BMPH Skrining, Strip gula darah	Farmalkes	5.518.675
Oxygen Concentrator	Pusat Krisis Kesehatan	115.200.000
RDT AG COVID dan VTM Lakebio	Dit. Surkarkes	39.631.120
Buku saku panduan petugas kesehatan IHR, Buku IHR, Buku Permenkes Nomor 40 th 2015 dan SKKI	Dit. Surkarkes	5.513.100
Vaksin Influenza 80 vial	Dit. Surkarkes	9.400.000
Vaksin Tifoid 3 vial	Dit. Surkarkes	628.869
Logistik Kit Spesimen (Gown Disposable dll)	Dit. Surkarkes	21.803.453
Jumlah		5.212.306.363

Ekuitas Akhir

Rp69.388.623.438

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.69.388.623.438,00 dan Rp.70.716.982.011,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Terdapat pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2024 sebesar Rp397.211,- dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	NTPN	NTB/NTP	SETORAN PER AKUN (Rp)	KETERANGAN
1	Bendahara Penerimaan BKK Kelas I Bandung	08/01/2025	E495F55DFIA3VSQD	537938422736	43.788,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 An. Boyke Tanaka
2	Bendahara Penerimaan BKK Kelas I Bandung	08/01/2025	D17720NA0DE5UU42	418590668029	126.980,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 An. dr David Grandisa
3	Bendahara Penerimaan BKK Kelas I Bandung	08/01/2025	5675C1JNG80IBUGE	745520491802	87.760,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 An. TRI WISNU WARDHANI
4	Bendahara Penerimaan BKK Kelas I Bandung	08/01/2025	524E92G502IUOSA9	461278220147	87.760,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 An. Rahmawati Jati
5	Bendahara Penerimaan BKK Kelas I Bandung	08/01/2025	3B0F43CIFT5B5RML	667228181428	31.343,00	Pengembalian belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Desember 2024 an. Euis Herwati
6	Bendahara Penerimaan BKK Kelas I Bandung	09/01/2025	D101F0NA0DE5UTQE	954065317000	19.580,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 An. Yenni Rissa
Total (Rp)					397.211,00	

2. Pengembalian Belanja Barang: belanja barang tahun yang lalu 425912 akibat kesalahan kode satker yang seharusnya dikembalikan ke Poltekkes Bandung,

namun Telkom menambahkan ke BKK Kelas I Bandung sebesar Rp 621.600, sudah dilakukan koreksi penerimaan pada tanggal 28 November 2025

3. Terdapat perbedaan nilai pada barang persediaan rusak dan usang di Aplikasi SAKTI Role GLP (Neraca Percobaan Akrua) dengan nilai Rp 5.876.019 dengan Laporan Persediaan Rp 5.891.685 sehingga selisih Rp 15.666. Hal tersebut akibat gagalnya aplikasi melakukan penghapusan data barang usang rusak. Sehingga nilai yang sebenarnya adalah nilai sesuai Neraca Percobaan Akrua. Permasalahan ini sudah di laporkan dan bertiket ke HAIDJKN Kementerian Keuangan, namun masih dalam proses perbaikan data.
4. Terdapat kelebihan bayar belanja pegawai tunjangan kinerja Desember 2025 sebesar Rp 130.550 an Abdul Latief dan Euis Herwati, sudah dilakukan pengembalian ke Kas negara di bulan Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	NTPN	NTB/NTP	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	02/01/2026	81FB06U8FGON4UVV	533682656285	Rp15.671,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025 An Euis Herwati
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	02/01/2026	39459490011HTTHK	592134391108	Rp114.879,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025 An.Abdul Latif Fitroh
Total				Rp130.550,00	

5. Terdapat transaksi resiprokal berupa belanja pemeriksaan leptosiora dan hantavirus di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2025 sebesar Rp 51.500.000,- No Referensi 259991702050651, No Dokumen 00001/BLJ/415712/2025

LAMPIRAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
BANDUNG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KPPN BANDUNG I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 415712 - BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 23/01/26 8:12

Kode Lap : shr_kppn_poc

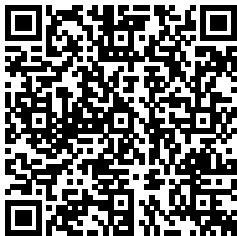
No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	28,103,396,000	28,103,396,000	0
1	Pagu Belanja	28,103,396,000	28,103,396,000	0
2	Belanja	21,854,117,027	21,854,117,027	0
2	Belanja	21,854,117,027	21,854,117,027	0
3	Pengembalian Belanja	-1,899,148	-1,899,148	0
3	Pengembalian Belanja	-1,899,148	-1,899,148	0
4	Estimasi Pendapatan	1,710,525,000	1,710,525,000	0
4	Estimasi Pendapatan	1,710,525,000	1,710,525,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	8,625,740,211	8,625,740,211	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	8,625,740,211	8,625,740,211	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

DATA SETORAN/BELANJA BELUM MASUK KE SIAP

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 6:09 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,616,155,000	7,877,400,001	738,754,999	9.378
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,616,155,000	7,877,400,001	738,754,999	9.378
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,616,155,000	7,877,400,001	738,754,999	9.378
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	12,970,690,899	12,029,470,077	941,220,822	7.824
Beban Persediaan	5,168,946,182	6,011,608,997	(842,662,815)	(14.017)
Beban Barang dan Jasa	5,214,881,277	7,770,503,796	(2,555,622,519)	(32.889)
Beban Pemeliharaan	1,301,866,065	1,361,100,938	(59,234,873)	(4.352)
Beban Perjalanan Dinas	1,410,471,696	3,864,706,515	(2,454,234,819)	(63.504)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 6:09 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,184,785,877	2,358,251,766	(173,465,889)	(7.356)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	28,251,641,996	33,395,642,089	(5,144,000,093)	(15.403)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19,635,486,996)	(25,518,242,088)	5,882,755,092	(23.053)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	8,566,400	65,500,000	(56,933,600)	(86.922)
Pendapatan Pelepasan Aset	8,566,400	65,500,000	(56,933,600)	(86.922)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4,857,208)	(1,291,388)	(3,565,820)	276.123
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,018,811	0	1,018,811	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,876,019	1,291,388	4,584,631	355.016
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,709,192	64,208,612	(60,499,420)	(94.223)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19,631,777,804)	(25,454,033,476)	5,822,255,672	(22.874)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19,631,777,804)	(25,454,033,476)	5,822,255,672	(22.874)

Keterangan :
FINAL



Bandung, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
DR. CELIA DWISANGKA
190001042002121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	70,716,982,011	71,793,261,669	(1,076,279,658)	(1.5)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19,631,777,804)	(25,454,033,476)	5,822,255,672	(22.87)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,303,419,231	24,377,753,818	(6,074,334,587)	(24.92)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,328,358,573)	(1,076,279,658)	(252,078,915)	23.42
EKUITAS AKHIR	69,388,623,438	70,716,982,011	(1,328,358,573)	(1.88)

Keterangan :

FINAL

Bandung, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kurasa Pengguna Anggaran



DR. EDY DWISANGKA

16200042002121003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT 05
SATUAN KERJA : BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG 415712

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,710,525,000	8,625,740,211	6,915,215,211	504	1,597,125,000	7,942,900,001	(6,345,775,001)	497
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,710,525,000	8,625,740,211	6,915,215,211	504	1,597,125,000	7,942,900,001	(6,345,775,001)	497
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,710,525,000	8,625,740,211	6,915,215,211	504	1,597,125,000	7,942,900,001	(6,345,775,001)	497
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	28,103,396,000	21,852,217,879	(6,251,178,121)	78	28,172,373,000	27,706,092,708	466,280,292	98
1. Belanja Pegawai	12,998,369,000	12,970,690,899	(27,678,101)	100	12,213,181,000	12,029,470,077	183,710,923	98
2. Belanja Barang	14,367,336,000	8,177,276,137	(6,190,059,863)	57	13,387,192,000	13,215,042,631	172,149,369	99
3. Belanja Modal	737,691,000	704,250,843	(33,440,157)	95	2,572,000,000	2,461,580,000	110,420,000	96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



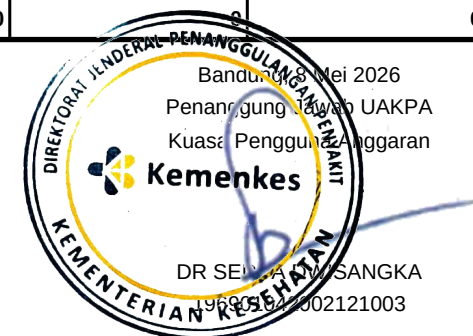
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT 05
SATUAN KERJA : BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG 415712

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	28,103,396,000	21,852,217,879	(6,251,178,121)	78	28,172,373,000	27,706,092,708	466,280,292	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
JAWA BARAT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 6:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,821,500,000	3,802,487,000	3,802,486,100	0	3,802,486,100	100	900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	77,000	57,000	56,692	24	56,668	99.42	332
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	264,179,000	269,850,000	269,771,640	0	269,771,640	99.97	78,360
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	85,387,000	84,355,000	84,289,678	0	84,289,678	99.92	65,322
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	407,510,000	453,175,000	453,172,000	0	453,172,000	100	3,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	45,000,000	29,963,000	29,815,924	0	29,815,924	99.51	147,076
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	207,555,000	202,800,000	202,776,000	0	202,776,000	99.99	24,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	482,445,000	518,422,000	518,058,000	0	518,058,000	99.93	364,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	38,850,000	28,350,000	28,305,000	570,000	27,735,000	97.83	615,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,377,703,000	5,414,659,000	5,413,931,034	570,024	5,413,361,010	99.98	1,297,990
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	417,861,000	605,618,000	605,588,252	0	605,588,252	100	29,748
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16,000	14,000	10,647	0	10,647	76.05	3,353
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,429,000	35,820,000	35,690,372	0	35,690,372	99.64	129,628
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	11,771,000	11,050,000	10,857,706	0	10,857,706	98.26	192,294
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	37,950,000	60,850,000	60,793,748	0	60,793,748	99.91	56,252
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29,663,000	36,350,000	36,276,385	0	36,276,385	99.8	73,615
511628	Belanja Uang Makan PPPK	85,970,000	105,244,000	105,118,000	0	105,118,000	99.88	126,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	610,660,000	854,946,000	854,335,110	0	854,335,110	99.93	610,890
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	465,552,000	392,398,000	375,332,000	0	375,332,000	95.65	17,066,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	56,784,000	88,056,000	79,739,000	0	79,739,000	90.55	8,317,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	522,336,000	480,454,000	455,071,000	0	455,071,000	94.72	25,383,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,453,263,000	5,436,810,000	5,436,723,499	0	5,436,723,499	100	86,501
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	684,706,000	811,500,000	811,200,280	0	811,200,280	99.96	299,720
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	6,137,969,000	6,248,310,000	6,247,923,779	0	6,247,923,779	99.99	386,221
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	12,648,668,000	12,998,369,000	12,971,260,923	570,024	12,970,690,899	99.79	27,678,101
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	843,832,000	894,709,000	811,117,741	0	811,117,741	90.66	83,591,259

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
JAWA BARAT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 6:12 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,670,000	2,632,000	2,631,168	0	2,631,168	99.97	832
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133,746,000	144,600,000	144,600,000	0	144,600,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	88,893,000	94,793,000	5,738,000	0	5,738,000	6.05	89,055,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,078,141,000	1,136,734,000	964,086,909	0	964,086,909	84.81	172,647,091
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,133,122,000	1,156,409,000	392,112,762	0	392,112,762	33.91	764,296,238
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,863,000	4,863,000	2,405,000	0	2,405,000	49.46	2,458,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	20,923,000	20,923,000	0	20,923,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,141,585,000	1,185,795,000	415,440,762	0	415,440,762	35.03	770,354,238
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	648,845,000	592,803,000	234,860,240	0	234,860,240	39.62	357,942,760
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	648,845,000	592,803,000	234,860,240	0	234,860,240	39.62	357,942,760
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	615,000,000	430,023,000	430,021,246	1,329,124	428,692,122	99.69	1,330,878
522112	Belanja Langganan Telepon	49,200,000	51,616,000	32,615,095	0	32,615,095	63.19	19,000,905
522113	Belanja Langganan Air	30,083,000	21,821,000	14,820,095	0	14,820,095	67.92	7,000,905
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	135,000,000	149,512,000	147,328,625	0	147,328,625	98.54	2,183,375
522141	Belanja Sewa	153,000,000	143,520,000	65,688,002	0	65,688,002	45.77	77,831,998
522151	Belanja Jasa Profesi	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,464,918,000	4,067,269,000	3,159,656,526	0	3,159,656,526	77.68	907,612,474
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,451,201,000	4,867,761,000	3,850,129,589	1,329,124	3,848,800,465	79.07	1,018,960,535
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	529,632,000	529,632,000	316,621,083	0	316,621,083	59.78	213,010,917
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,146,684,000	1,389,163,000	985,244,982	0	985,244,982	70.92	403,918,018
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,751,000	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,682,067,000	1,920,545,000	1,303,616,065	0	1,303,616,065	67.88	616,928,935
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,091,168,000	4,148,781,000	1,240,950,696	0	1,240,950,696	29.91	2,907,830,304
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	572,530,000	514,917,000	169,521,000	0	169,521,000	32.92	345,396,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,663,698,000	4,663,698,000	1,410,471,696	0	1,410,471,696	30.24	3,253,226,304
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	14,665,537,000	14,367,336,000	8,178,605,261	1,329,124	8,177,276,137	56.92	6,190,059,863
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
JAWA BARAT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/26 6:12 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/26 2:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	737,691,000	704,250,843	0	704,250,843	95.47	33,440,157
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	737,691,000	704,250,843	0	704,250,843	95.47	33,440,157
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	737,691,000	704,250,843	0	704,250,843	95.47	33,440,157
	JUMLAH BELANJA	27,314,205,000	28,103,396,000	21,854,117,027	1,899,148	21,852,217,879	77.76	6,251,178,121

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
JAWA BARAT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 6:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,821,500,000	3,802,487,000	3,802,486,100	0	3,802,486,100	100	900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	77,000	57,000	56,692	24	56,668	99.42	332
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	264,179,000	269,850,000	269,771,640	0	269,771,640	99.97	78,360
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	85,387,000	84,355,000	84,289,678	0	84,289,678	99.92	65,322
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	407,510,000	453,175,000	453,172,000	0	453,172,000	100	3,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	45,000,000	29,963,000	29,815,924	0	29,815,924	99.51	147,076
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	207,555,000	202,800,000	202,776,000	0	202,776,000	99.99	24,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	482,445,000	518,422,000	518,058,000	0	518,058,000	99.93	364,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	38,850,000	28,350,000	28,305,000	570,000	27,735,000	97.83	615,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,377,703,000	5,414,659,000	5,413,931,034	570,024	5,413,361,010	99.98	1,297,990
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	417,861,000	605,618,000	605,588,252	0	605,588,252	100	29,748
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16,000	14,000	10,647	0	10,647	76.05	3,353
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,429,000	35,820,000	35,690,372	0	35,690,372	99.64	129,628
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	11,771,000	11,050,000	10,857,706	0	10,857,706	98.26	192,294
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	37,950,000	60,850,000	60,793,748	0	60,793,748	99.91	56,252
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29,663,000	36,350,000	36,276,385	0	36,276,385	99.8	73,615
511628	Belanja Uang Makan PPPK	85,970,000	105,244,000	105,118,000	0	105,118,000	99.88	126,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	610,660,000	854,946,000	854,335,110	0	854,335,110	99.93	610,890
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	465,552,000	392,398,000	375,332,000	0	375,332,000	95.65	17,066,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	56,784,000	88,056,000	79,739,000	0	79,739,000	90.55	8,317,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	522,336,000	480,454,000	455,071,000	0	455,071,000	94.72	25,383,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,453,263,000	5,436,810,000	5,436,723,499	0	5,436,723,499	100	86,501
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	684,706,000	811,500,000	811,200,280	0	811,200,280	99.96	299,720
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	6,137,969,000	6,248,310,000	6,247,923,779	0	6,247,923,779	99.99	386,221
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	12,648,668,000	12,998,369,000	12,971,260,923	570,024	12,970,690,899	99.79	27,678,101
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	843,832,000	894,709,000	811,117,741	0	811,117,741	90.66	83,591,259

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
JAWA BARAT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 6:11 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,670,000	2,632,000	2,631,168	0	2,631,168	99.97	832
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133,746,000	144,600,000	144,600,000	0	144,600,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	88,893,000	94,793,000	5,738,000	0	5,738,000	6.05	89,055,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,078,141,000	1,136,734,000	964,086,909	0	964,086,909	84.81	172,647,091
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,133,122,000	1,156,409,000	392,112,762	0	392,112,762	33.91	764,296,238
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,863,000	4,863,000	2,405,000	0	2,405,000	49.46	2,458,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	20,923,000	20,923,000	0	20,923,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,141,585,000	1,185,795,000	415,440,762	0	415,440,762	35.03	770,354,238
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	648,845,000	592,803,000	234,860,240	0	234,860,240	39.62	357,942,760
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	648,845,000	592,803,000	234,860,240	0	234,860,240	39.62	357,942,760
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	615,000,000	430,023,000	430,021,246	1,329,124	428,692,122	99.69	1,330,878
522112	Belanja Langganan Telepon	49,200,000	51,616,000	32,615,095	0	32,615,095	63.19	19,000,905
522113	Belanja Langganan Air	30,083,000	21,821,000	14,820,095	0	14,820,095	67.92	7,000,905
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	135,000,000	149,512,000	147,328,625	0	147,328,625	98.54	2,183,375
522141	Belanja Sewa	153,000,000	143,520,000	65,688,002	0	65,688,002	45.77	77,831,998
522151	Belanja Jasa Profesi	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,464,918,000	4,067,269,000	3,159,656,526	0	3,159,656,526	77.68	907,612,474
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,451,201,000	4,867,761,000	3,850,129,589	1,329,124	3,848,800,465	79.07	1,018,960,535
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	529,632,000	529,632,000	316,621,083	0	316,621,083	59.78	213,010,917
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,146,684,000	1,389,163,000	985,244,982	0	985,244,982	70.92	403,918,018
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,751,000	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,682,067,000	1,920,545,000	1,303,616,065	0	1,303,616,065	67.88	616,928,935
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,091,168,000	4,148,781,000	1,240,950,696	0	1,240,950,696	29.91	2,907,830,304
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	572,530,000	514,917,000	169,521,000	0	169,521,000	32.92	345,396,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,663,698,000	4,663,698,000	1,410,471,696	0	1,410,471,696	30.24	3,253,226,304
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	14,665,537,000	14,367,336,000	8,178,605,261	1,329,124	8,177,276,137	56.92	6,190,059,863
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
JAWA BARAT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 6:11 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	737,691,000	704,250,843	0	704,250,843	95.47	33,440,157
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	737,691,000	704,250,843	0	704,250,843	95.47	33,440,157
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	737,691,000	704,250,843	0	704,250,843	95.47	33,440,157
	JUMLAH BELANJA	27,314,205,000	28,103,396,000	21,854,117,027	1,899,148	21,852,217,879	77.76	6,251,178,121

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I : 05 **DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 415712 **BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/26 6:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,566,400	0	8,566,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	8,566,400	0	8,566,400	
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	70,650,000	265,380,000	0	265,380,000	375.63
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	632,875,000	660,705,000	0	660,705,000	104.4
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	1,007,000,000	7,690,070,000	0	7,690,070,000	763.66
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	1,710,525,000	8,616,155,000	0	8,616,155,000	503.71
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	397,211	0	397,211	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	621,600	0	621,600	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,018,811	0	1,018,811	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,710,525,000	8,625,740,211	0	8,625,740,211	504.27
	JUMLAH PENDAPATAN	1,710,525,000	8,625,740,211	0	8,625,740,211	504.27

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM

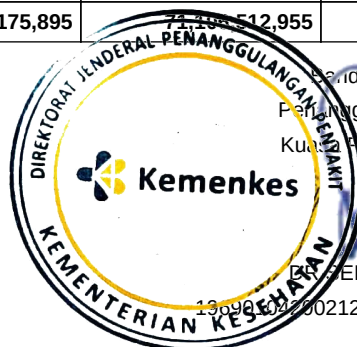
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1,209,910,446	1,186,380,844	23,529,602	1.98
JUMLAH ASET LANCAR	1,209,910,446	1,186,380,844	23,529,602	1.98
ASET TETAP				
Tanah	38,455,235,600	38,455,235,600	0	0.00
Peralatan dan Mesin	43,182,042,326	43,220,960,443	(38,918,117)	(0.09)
Gedung dan Bangunan	29,429,070,250	29,429,070,250	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	683,893,440	683,893,440	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(43,532,340,026)	(42,205,923,109)	(1,326,416,917)	3.14
JUMLAH ASET TETAP	68,217,901,590	69,583,236,624	(1,365,335,034)	(1.96)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	168,580,000	(168,580,000)	(100.00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	237,363,859	336,895,487	(99,531,628)	(29.54)
Aset Lain-lain	2,852,894,619	2,399,510,969	453,383,650	18.89
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,852,894,619)	(2,568,090,969)	(284,803,650)	11.09
JUMLAH ASET LAINNYA	237,363,859	336,895,487	(99,531,628)	(29.54)
JUMLAH ASET	69,665,175,895	71,106,512,955	(1,441,337,060)	(2.03)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	276,552,457	389,530,944	(112,978,487)	(29.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	276,552,457	389,530,944	(112,978,487)	(29.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	276,552,457	389,530,944	(112,978,487)	(29.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	69,388,623,438	70,716,982,011	(1,328,358,573)	(1.88)
JUMLAH EKUITAS	69,388,623,438	70,716,982,011	(1,328,358,573)	(1.88)
JUMLAH EKUITAS	69,388,623,438	70,716,982,011	(1,328,358,573)	(1.88)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	69,665,175,895	71,106,512,955	(1,441,337,060)	(2.03)

Keterangan :

FINAL



Bandung, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuat Pengguna Anggaran

EDYA DWISANGKA
13098012002121003 196901042002121003

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

UNIT ORGANISASI : 05

WILAYAH/PROVINSI : 0200

SATUAN KERJA : 415712

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

JAWA BARAT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tgl. Cetak 08/05/2026 6:12 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	923,814,277	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	262,566,567	0
0.0	131111	Tanah	38,455,235,600	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	43,220,960,443	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	29,429,070,250	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	457,294,080	0
0.0	134112	Irigasi	222,299,360	0
0.0	134113	Jaringan	4,300,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	37,902,275,940
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,194,629,408
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	68,594,115
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	36,123,646
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,300,000
0.0	162151	Software	168,580,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	336,895,487	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,399,510,969	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,399,510,969
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	168,580,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	52,635,457
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	336,895,487
0.0	391111	Ekuitas	0	70,716,982,011
JUMLAH			115,880,527,033	115,880,527,033

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	150,063,323	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,059,847,123	0
0.0	131111	Tanah	38,455,235,600	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	43,182,042,326	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	29,429,070,250	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	457,294,080	0
0.0	134112	Irigasi	222,299,360	0
0.0	134113	Jaringan	4,300,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	38,599,604,470
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,809,014,429
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	77,739,997
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	41,681,130
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,300,000
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	237,363,859	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,852,894,619	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,852,894,619
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	39,188,598
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	237,363,859
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	21,852,217,879
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,625,740,211	0
0.0	313211	Transfer Keluar	135,364,800	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,212,306,363
0.0	391111	Ekuitas	0	70,716,982,011
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,566,400
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	265,380,000
3.0	425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	660,705,000
3.0	425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	7,690,070,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	397,211
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	621,600
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,802,486,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	56,668	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	269,771,640	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	84,289,678	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	453,172,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	29,815,924	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	202,776,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	518,058,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	27,735,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	605,588,252	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	10,647	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	35,690,372	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	10,857,706	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	60,793,748	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	36,276,385	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	105,118,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	375,332,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	79,739,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,436,723,499	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	811,200,280	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	811,117,741	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,631,168	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144,600,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,738,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	392,112,762	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,405,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	20,923,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	415,791,750	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	32,614,540	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	14,274,163	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	147,328,625	0
3.0	522141	Beban Sewa	65,688,002	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,159,656,526	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	316,621,083	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	985,244,982	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,240,950,696	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	169,521,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,555,697,490	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	614,385,021	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9,145,882	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5,557,484	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	952,659,628	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	4,216,286,554	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	5,876,019	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



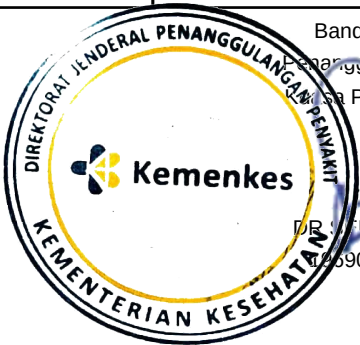
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			153,069,033,566	153,069,033,566

Keterangan :
FINAL



Bandung, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Pegawai Pengguna Anggaran

DR. NITA DWISANGKA
26901042002121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	21,852,217,879
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	8,625,740,211	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,566,400
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	265,380,000
3.0	425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	660,705,000
3.0	425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	7,690,070,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	397,211
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	621,600
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,802,486,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56,692	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	269,771,640	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	84,289,678	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	453,172,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	29,815,924	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	202,776,000	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	518,058,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,305,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	605,588,252	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,647	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	35,690,372	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,857,706	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	60,793,748	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	36,276,385	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	105,118,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	375,332,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	79,739,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,436,723,499	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	811,200,280	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	811,117,741	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,631,168	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,600,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,738,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	392,112,762	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,405,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	20,923,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	234,860,240	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	430,021,246	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (415712) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 6:10 AM

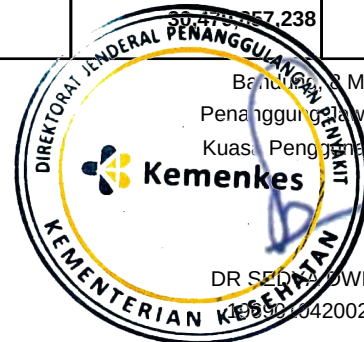
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	32,615,095	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	14,820,095	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	147,328,625	0
3.0	522141	Belanja Sewa	65,688,002	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,159,656,526	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	316,621,083	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	985,244,982	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,750,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,240,950,696	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	169,521,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704,250,843	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	24
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	570,000
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	1,329,124
JUMLAH			30,479,857,238	30,479,857,238

Keterangan :

FINAL



Bandung, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuas. Pengg. Anggaran

DR. SEDIK DWISANGKA
KIP.001.042002121003

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 415712 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tgl.Data : 08/05/26 12:35 AM
Tgl.Cetak : 08/05/26 6:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	150,063,323
117199	Persediaan Lainnya	1,059,847,123
131111	Tanah	38,455,235,600
132111	Peralatan dan Mesin	43,182,042,326
133111	Gedung dan Bangunan	29,429,070,250
134111	Jalan dan Jembatan	457,294,080
134112	Irigasi	222,299,360
134113	Jaringan	4,300,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38,599,604,470)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,809,014,429)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(77,739,997)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(41,681,130)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4,300,000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,852,894,619
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,852,894,619)
J U M L A H		69,427,812,036

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 415712 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tanggal : 08/05/26 6:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	923,814,277
117199	Persediaan Lainnya	262,566,567
131111	Tanah	38,455,235,600
132111	Peralatan dan Mesin	43,220,960,443
133111	Gedung dan Bangunan	29,429,070,250
134111	Jalan dan Jembatan	457,294,080
134112	Irigasi	222,299,360
134113	Jaringan	4,300,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(37,902,275,940)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,194,629,408)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(68,594,115)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(36,123,646)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4,300,000)
162151	Software	168,580,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,399,510,969
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,399,510,969)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(168,580,000)
J U M L A H		70,769,617,468

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 415712 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 6:15 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		5,973	38,455,235,600	0	0	0	0	5,973	38,455,235,600
20101	TANAH PERSIL	-	5,973	38,455,235,600	0	0	0	0	5,973	38,455,235,600
132111	Peralatan dan Mesin		2,675	43,346,250,131	94	840,373,843	72	858,921,186	2,697	43,327,702,788
30103	ALAT BANTU	-	12	1,394,485,000	0	0	0	0	12	1,394,485,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	52	11,943,538,490	0	0	1	253,790,400	51	11,689,748,090
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	5	14,500,000	0	0	0	0	5	14,500,000
30303	ALAT UKUR	-	19	623,172,700	0	0	0	0	19	623,172,700
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	48	1,249,122,457	0	0	5	108,862,000	43	1,140,260,457
30501	ALAT KANTOR	-	313	2,464,543,531	0	0	2	8,747,000	311	2,455,796,531
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,127	6,806,270,732	15	49,523,000	13	24,630,500	1,129	6,831,163,232
30601	ALAT STUDIO	-	34	556,234,557	14	10,500,000	0	0	48	566,734,557
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	14	311,913,000	0	0	0	0	14	311,913,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	8	1,217,068,728	0	0	0	0	8	1,217,068,728
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	466	3,572,240,047	10	115,200,000	23	174,769,000	453	3,512,671,047
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	19	335,450,835	0	0	2	16,450,000	17	319,000,835
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	95	3,062,718,661	0	0	11	119,307,225	84	2,943,411,436
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	17	21,853,920	0	0	0	0	17	21,853,920
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	4	29,070,000	0	0	0	0	4	29,070,000
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	5	493,479,350	0	0	0	0	5	493,479,350
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	29	1,768,704,137	0	0	1	1	28	1,768,704,136
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	10	18,478,172	0	0	0	0	10	18,478,172
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	19	1,003,401,635	0	0	0	0	19	1,003,401,635
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	16	3,295,176,330	0	0	0	0	16	3,295,176,330
31001	KOMPUTER UNIT	-	139	1,921,205,613	37	608,949,220	13	146,700,060	163	2,383,454,773
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	108	725,890,012	18	56,201,623	1	5,665,000	125	776,426,635
31501	ALAT DETEKSI	-	76	244,350,350	0	0	0	0	76	244,350,350
31502	ALAT PELINDUNG	-	8	59,684,810	0	0	0	0	8	59,684,810
31503	ALAT SAR	-	12	73,377,997	0	0	0	0	12	73,377,997
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	2	10,560,000	0	0	0	0	2	10,560,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	10	75,643,272	0	0	0	0	10	75,643,272
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	8	54,115,795	0	0	0	0	8	54,115,795
133111	Gedung dan Bangunan		8	29,429,070,250	0	0	0	0	8	29,429,070,250
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	7	29,205,264,250	0	0	0	0	7	29,205,264,250
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	223,806,000	0	0	0	0	1	223,806,000
134111	Jalan dan Jembatan		166	457,294,080	0	0	0	0	166	457,294,080
50102	JEMBATAN	-	166	457,294,080	0	0	0	0	166	457,294,080

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 415712 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 6:15 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134112	Irigasi		1	222,299,360	0	0	0	0	1	222,299,360
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	222,299,360	0	0	0	0	1	222,299,360
134113	Jaringan		1	4,300,000	0	0	0	0	1	4,300,000
50310	INSTALASI LAIN	-	1	4,300,000	0	0	0	0	1	4,300,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		84	2,401,435,969	72	858,921,186	81	406,910,310	75	2,853,446,845
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	1	253,790,400	0	0	1	253,790,400
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	0	0	5	108,862,000	0	0	5	108,862,000
30501	ALAT KANTOR	-	11	25,640,150	2	8,747,000	11	25,640,150	2	8,747,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	50	128,911,160	13	24,630,500	50	128,911,160	13	24,630,500
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	197,000	0	0	1	197,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	418,300,000	23	174,769,000	0	0	24	593,069,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	0	0	2	16,450,000	0	0	2	16,450,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	11	119,307,225	0	0	11	119,307,225
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	0	0	1	1	0	0	1	1
31001	KOMPUTER UNIT	-	16	235,167,000	13	146,700,060	16	235,167,000	13	146,700,060
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	5	1,593,220,659	1	5,665,000	3	16,995,000	3	1,581,890,659
TOTAL				114,315,885,390		1,699,295,029		1,265,831,496		114,749,348,923

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 415712 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM
Tanggal : 08/05/26 6:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	313,500
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	20,000
1010301003	Penjepit Kertas	452,600
1010301006	Ordner Dan Map	450,000
1010301012	Staples	150,000
1010301013	Isi Staples	126,600
1010301014	Barang Cetakan	60,369,872
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	265,900
1010302001	Kertas HVS	1,070,000
1010302004	Amplop	90,000
1010304003	Pita Printer	3,762,456
1010304004	Tinta/Toner Printer	7,781,573
1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	21,803,453
1010311002	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	38,911,120
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	1,824,631
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	4,928,813
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)	340,046
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	389,557
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	219,311
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	326,640
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6,467,251
Jumlah Barang Konsumsi		150,063,323
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	1,051,621,835
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	1,986,392
1010401003	Obat Gas (Persediaan Lainnya)	1,750,000
1010401004	Obat Serbuk/Tepung (Persediaan Lainnya)	189,924
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	4,298,972
Jumlah Persediaan Lainnya		1,059,847,123
TOTAL		1,209,910,446

Keterangan :
1. Persediaan senilai Rp. 1,453,977 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 4,437,708 dalam kondisi usang.

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 415712 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM
Tanggal : 08/05/26 6:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_satker

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	150,063,323
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	1,059,847,123
JUMLAH		1,209,910,446

UAPB : KEMENTERIAN KESEHATAN
UAPPB-E1 : DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
UAPPB-W : Kantor Daerah

DAFTAR PERSEDIAAN RUSAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
KODE UAKPB : 024.05.0200.415712

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH PER 31-12-2025
1010301014	Barang Cetak	14	102,108
000002	Buku Kesehatan Kapal	13	6,975
000109	Buku_ICV 2024	1	11,433
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	2	619,824
000046	Vaksin Yellow Fever Tahap 3	2	309,912
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	4	407,860
000137	Vaksin Meningitis Meningokokus tahap 4	4	101,965
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	5	324,185
000087	Paket jamaah tahun 2025	5	64,837
Jumlah per Akun		25	1,453,977
Jumlah Total		25	1,453,977



BANDUNG, 23-01-2026
Petugas Pengelola Persediaan

YANI SALAM, S. Si
NIP 197802202006042003

UAPB : KEMENTERIAN KESEHATAN

UAPPB-E1 : DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

UAPPB-W : Kantor Daerah

DAFTAR PERSEDIAAN USANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

KODE UAKPB : 024.05.0200.415712

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH PER 31-12-2025
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	160	1,822,599
000013	OBH 100 ml IKA	5	14,680
000018	Erlamycetine Ear Drops 1 %	6	12,490
000022	Iodine Povidone Lar 10 % 30 ml	1	6,660
000026	Diphenhydramine Inj	16	4,440
000027	Epinephrine 0.1 % Inj	1	3,197
000027	Epinephrine 0.1 % Inj	12	5,342
000031	Atropin Sulf 0.25 mg	9	4,579
000032	Asering 500 ml	4	44,266
000037	Ringer Lactat Infus 500 ml	7	11,047
000038	Atropin Sulf 0.25 mg Amp @ 100	17	6,938
000039	Combivent 2.5 ml UDV 205	10	29,090
000040	Cortidex Inj @ 10	20	9,089
000041	Diphenhydramine 10 mg/ml	20	4,163
000041	Diphenhydramine 10 mg/ml	3	4,329
000044	Ketorolac 10 mg inj amp @12	2	3,244
000061	Ringer Lactat_ Infus 500 ml	11	10,623
000062	Sodium Chloride_0,9% 500 ml	16	26,465
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	2,478	1,993,527
000002	Cetirizine Tab 10 mg	6	601
000018	Salbutamol Tab 2 mg	60	142
000030	Neoremacyl	1	48,900
000037	Ambroxol 30 mg	50	562
000038	Allopurinol 100 mg	220	478
000041	Amlodipine 10 mg	118	500
000043	Antimo Dewasa	13	661
000045	Betahistine	24	1,118
000052	Dexamethasone 0.5 mg	3	123
000053	Glimepiride 2 mg	100	971
000054	Irbesartan 150 mg	30	4,218
000064	Spasminal	20	1,266
000068	Amlodipine 10 mg @50 tab	12	105
000071	Antasida Doen	48	520
000081	Loratadine 10 mg	58	403
000085	Neurodex Drag	12	848
000087	Piroxicam 20 mg	10	310
000088	Simvastatin 20 mg	175	454
000088	Simvastatin 20 mg	2	454
000098	Ibuprofen 400 mg tab	15	394
000103	Ranitidin 150 mg @100 tab	30	463
000103	Ranitidin 150 mg @100 tab	66	416

DAFTAR PERSEDIAAN USANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

KODE UAKPB : 024.05.0200.415712

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH PER 31-12-2025
000104	Amoxycillin 500 mg tab @100	200	1,879
000109	Dimenhydrinate 50 mg (dus 100 tab)	249	212
000110	Domperidone 10 mg tab @1000 GDX	98	529
000112	Irbesartan 150 mg tab @50	20	3,220
000123	Adalat Oros 30 mg @30	10	12,434
000124	Cedocard 10 mg	10	2,231
000129	Nitrokaf Retard Cap	10	2,084
000149	Amoxycillin_500 mg	58	1,134
000163	Aciclovir 400 mg	100	1,441
000168	Betahistin 6 mg	9	1,291
000176	Metformin_500 mg	235	348
000181	Neurodex_drag	128	764
000182	Paracetamol_500_mg	47	540
000182	Paracetamol_500_mg	72	778
000183	Ranitidin_150 mg	70	354
000183	Ranitidin_150 mg	64	500
000184	Simvastatin_20_mg	23	472
000186	Acyclovir 400 mg tab @50	2	1,294
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	76	191,596
000001	Salicyl KF Plus Menthol 50 gr	6	13,966
000007	Cefadroxil_500 mg	70	1,540
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	36	297,420
000003	Betametasone CR 5 g	8	3,076
000009	Gentamycin 0.1 %	2	4,113
000011	Chloramfecort H Cream	5	16,882
000020	Bioplacenton Jelly	1	31,968
000029	Thrombopop gel (nordmark)	1	74,231
000034	Betametasone_0,1 % CR	6	3,418
000038	Gentamycin 0.1% Gentamycin_0.1 %	13	4,113
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	4	132,566
000046	NaCl 0,9 % 500 ml	2	5,222
000046	NaCl 0,9 % 500 ml	1	5,222
000124	Vaksin Influenza (FLUBIO)	1	116,900
Jumlah per Akun		2,754	4,437,708

DAFTAR PERSEDIAAN USANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

KODE UAKPB : 024.05.0200.415712

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH PER 31-12-2025
Jumlah Total		2,754	4,437,708



Dibuat tanggal : 23-01-2026

Kuasa Pengguna Barang

KUASA PENGGUNA BARANG

dr. SEHA DWISAMUKA, M. Epid

NIP. 196901040002121003

BANDUNG, 23-01-2026
Petugas Pengelola Persediaan

YANI SALAM, S. Si
NIP 197802202006042003

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SATUAN KEPATUHAN INTERN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN

1. Obyek Reviu : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
2. Alamat Obyek Reviu : Jl Cikapayang No 5 Bandung
3. Sasaran Pendampingan : Laporan Keuangan
4. Periode Laporan Keuangan : 1 Januari – 31 Desember 2025
5. Surat Tugas No./Tgl : PS.03.05/C.X.5/ 295 /2026 Tanggal 26 Januari 2026
6. Waktu Reviu :
 - Rencana : 26 s.d 27 Januari 2026
 - Realisasi : 26 s.d 27 Januari 2026

NO	URAIAN KEGIATAN	TGL	NAMA PEJABAT	PARAF
1.	Laporan yang telah selesai dari Ketua Tim Penyusun LK diserahkan kepada Tim Reviu pada hari pertama setelah selesai penugasan	26 Januari	Lisda Daryati	
2.	Laporan direviu oleh Tim Reviu dan diparaf.	26 Januari	Putri Garnadithia, SAP Keke Riskawati, SKM	
3.	Laporan diserahkan ke Ketua TIM SKI selaku Tim Reviu LK TA 2025 BKK Kelas I Bandung dan di paraf.	27 Januari	Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM	
4.	Laporan yang telah selesai ditandatangani oleh Penanggungjawab Reviu diserahkan ke Subbag Administrasi Umum BKK Kelas I Bandung dan dibuatkan surat pengantar ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.	27 Januari	Wartoni, SKM, MPH	
5.	Kepala BKK Kelas I Bandung menandatangani Surat Pengantar Laporan	27 Januari	dr. Sedya Dwisangka, M.Epid	
6.	Laporan selesai, diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang di upload di Google drive Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.	27 Januari	Lisda Daryati	

Catatan :
Laporan Reviu Laporan Keuangan BKK Kelas I Bandung TA 2025 telah selesai

No. Surat Pengantar Laporan: PS.03.05/C.X.5/ /2026 Tanggal Januari 2026

**Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Satuan Kepatuhan Intern**

**IHTISAR HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
(KD-024.05.415712)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Satuan Kepatuhan Intern

Disusun oleh/Tanggal

Lisda D/ 27- 01-2026

Direviu oleh/Tanggal

Putri G, Keke R/ 27-01-2026

Disetujui oleh/Tanggal

Yani DS/ 27- 01-2026

UAPA	☐	Kementerian Kesehatan RI
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No.	Nama Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
					Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
A.	Penerimaan Negara dan Hibah	1.710.525.000	8.625.740.211	-	-	-	8.625.740.211
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.710.525.000	8.625.740.211	-	-	-	8.625.740.211
2	Hibah	-	-	-	-	-	-
B.	Belanja	-	-	-	-	-	-
	Rupiah Murni	28.103.396.000	21.852.217.879	-	-	-	-
1	Belanja Pegawai	12.998.369.000	12.970.690.899	-	-	-	12.970.690.899
2	Belanja Barang	14.367.336.000	8.177.276.137	-	-	-	8.177.276.137
3	Belanja Modal	737.691.000	704.250.843	-	-	-	704.250.843
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	PHLN	-	-	-	-	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-

*) Catatan :

[3] Nilai Pagu Dalam DIPA /revisi terakhir

[4] Realisasi dalam LRA Netto

Keterangan:

Sebelum reviu

= Nilai realisasi dalam LRA

Usulan koreksi

= Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

Status koreksi

= Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

Setelah koreksi hasil reviu

= Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU LAPORAN OPERASIONAL

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam LO)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
I	KEGIATAN OPERASIONAL					
A	PENDAPATAN OPERASIONAL					
1	Penerimaan Bukan Pajak	8.616.155.000	-	-	-	8.616.155.000
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	8.616.155.000	-	-	-	8.616.155.000
						-
B	BEBAN OPERASIONAL					
1	Beban Pegawai	12.970.690.899	-	-	-	12.970.690.899
2	Beban Persediaan	5.168.946.182	-	-	-	5.168.946.182
3	Beban Barang & Jasa	5.214.881.277	-	-	-	5.214.881.277
4	Beban Pemeliharaan	1.301.866.065	-	-	-	1.301.866.065
5	Beban Perjalanan Dinas	1.410.471.696	-	-	-	1.410.471.696
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
7	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	-
8	Beban penyusutan dan Amortisasi	2.184.785.877	-	-	-	2.184.785.877
9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-	-	-
10	Beban Lain- lain		-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	28.251.641.996	-	-	-	28.251.641.996
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19.635.486.996)	-	-	-	(19.635.486.996)
		-	-	-	-	-
II	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
A	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	8.566.400	-	-	-	8.566.400
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.566.400	-	-	-	8.566.400
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
	Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
B	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
C	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	(4.857.208)	-	-	-	(4.857.208)
	Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	1.018.811	-	-	-	1.018.811
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.876.019)	-	-	-	(5.876.019)
	Jumlah Surplus/(defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.709.192	-	-	-	3.709.192
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.709.192	-	-	-	3.709.192
III	POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
	Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
	SURPLUS (DEFISIT)-LO	(19.631.777.804)	-	-	-	(19.631.777.804)

Keterangan :

Sebelum reviu

Usulan koreksi

Status koreksi

Setelah koreksi hasil reviu

= Nilai akun dalam LO

= Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

= Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

= Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam LPE)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
A	EKUITAS AWAL	70.716.982.011	-	-	-	70.716.982.011
B	SURPLUS/DEFISIT LO	(19.631.777.804)	-	-	-	(19.631.777.804)
C	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	-	-	-
D	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-
1	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-	-
2	Koreksi Aset Tetap	-	-	-	-	-
3	Koreksi Atas Beban	-	-	-	-	-
4	Koreksi Atas Pendapatan	-	-	-	-	-
5	Koreksi Lain-Lain	-	-	-	-	-
E	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.303.419.231	-	-	-	18.303.419.231
F	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.328.358.573)	-	-	-	(1.328.358.573)
G	EKUITAS AKHIR	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438

Keterangan :

Sebelum reviu

= Nilai akun dalam LPE

Usulan koreksi

= Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

Status koreksi

= Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

Setelah koreksi hasil reviu

= Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU NERACA

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam Neraca)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
A	Aset Lancar					
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-
3	Kas lainnya dan setara kas	-	-	-	-	-
4	Kas pada BLU	-	-	-	-	-
5	Investasi dlm Deposito	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Pendek-BLU	-	-	-	-	-
7	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-	-	-	-
8	Uang muka belanja (prepayment)	-	-	-	-	-
9	Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
11	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	-	-	-	-	-
12	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TTP/TGR	-	-	-	-	-
14	<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)</i>	-	-	-	-	-
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	-	-	-	-	-
16	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA	-	-	-	-	-
17	<i>Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA (Netto)</i>	-	-	-	-	-
18	Piutang dari kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-	-
19	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-	-
20	<i>Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	-	-	-	-	-
21	Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-	-
22	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-	-
23	Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	-	-	-	-	-
24	Persediaan	1.209.910.446	-	-	-	1.209.910.446
25	Persediaan BLU	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar	1.209.910.446	-	-	-	1.209.910.446
B	Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
3	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	-	-	-	-	-
4	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	-	-	-	-	-
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA	-	-	-	-	-
6	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU	-	-	-	-	-
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU	-	-	-	-	-
8	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU (Netto)	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-

C.	Aset Tetap	-	-	-	-	-
	Tanah	38.455.235.600	-	-	-	38.455.235.600
	Tanah BLU		-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	43.182.042.326	-	-	-	43.182.042.326
	Peralatan dan Mesin BLU		-	-	-	-
	Gedung dan Bangunan	29.429.070.250	-	-	-	29.429.070.250
	Gedung dan Bangunan BLU		-	-	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	683.893.440	-	-	-	683.893.440
	Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU		-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya BLU	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(43.532.340.026)	-	-	-	(43.532.340.026)
	Jumlah Aset Tetap	68.217.901.590	-	-	-	68.217.901.590
D.	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Aset tak berwujud	-	-	-	-	-
	Dana yang dibatasi penggunaannya	237.363.859	-	-	-	237.363.859
	Aset lain-lain	2.852.894.619	-	-	-	2.852.894.619
	Aset lain-lain BLU	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(2.852.894.619)	-	-	-	(2.852.894.619)
	Jumlah Aset Lainnya	237.363.859	-	-	-	237.363.859
	JUMLAH ASET (A+B+C+D)	69.665.175.895	-	-	-	69.665.175.895
		-	-	-	-	-
II	Kewajiban	-	-	-	-	-
	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-	-
	Utang kepada pihak ketiga	276.552.457	-	-	-	276.552.457
	Utang yang belum ditagihkan	-	-	-	-	-
	Utang jangka pendek lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	276.552.457	-	-	-	276.552.457
		-	-	-	-	-
III	EKUITAS	-	-	-	-	-
	Ekuitas	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438
	JUMLAH EKUITAS	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438
		-	-	-	-	-
IV	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (Kewajiban + Ekuitas)	69.665.175.895	-	-	-	69.665.175.895

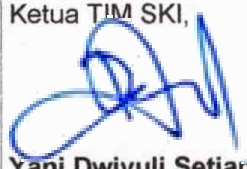
Keterangan :

Sebelum reviu = Nilai akun dalam neraca
Usulan koreksi = Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung
Status koreksi = Perbaikan saat reviu (sudah/belum)
Setelah koreksi hasil reviu = Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

**Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Satuan Kepatuhan Intern**

CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
(KD-024.05.415712)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern		Disusun oleh/Tanggal	Lisda D/ 27- 01- 2026
		Direviu oleh/Tanggal	Putri G, Keke R/ 27- 01-2026
		Disetujui oleh/Tanggal	Yani DS/ 27- 01- 2026
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan RI	
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat	
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
Penyajian LK:			
A. LRA			KKR.LRA
Tidak ditemukan permasalahan.			
B. LO			KKR.LO
Tidak ditemukan permasalahan.			
C. LPE			KKR.LPE
Tidak ditemukan permasalahan.			
D. Neraca			KKR.Neraca
Tidak ditemukan permasalahan.			
E. CaLK			KKR.CLK
Daftar tabel sudah ada namun belum memuat nomor halaman (sudah ditindaklanjuti)			
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan			
1. LRA - 2. LO - 3. LPE - 4. Neraca - 5. CaLK -			
Hal-Hal Lain yang Perlu Diungkapkan			
-			
Rekomendasi			
-			

Bandung, 27 Januari 2026 Pelaksana Reviu I,  Putri Garnadithia, SAP NIP. 198704072010122002	Bandung, 27 Januari 2026 Koordinator SAI/UAKPA,  Detianti Sri Irawati, SE NIP. 198503302015032002
Pelaksana Reviu II,  Keke Riskawati, SKM NIP. 199106282015032004 Penyusun Reviu / Sekretaris SKI,  Lisda Daryati NIP. 199005252012122001	Anggota SAI/UAKPB,  Yani Salam, S.Si NIP. 197802202006042003 Penanggungjawab SAI,  Wartoni, SKM, MPH NIP. 197606191999031001
Ketua TIM SKI,  Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM NIP. 197107301993032001	Mengetahui, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas Bandung  dr. Maya Dwisangka, M.Epid NIP. 196901042002121003

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Satuan Kepatuhan Intern

IHTISAR HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
(KD-024.05.415712)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern	Disusun oleh/Tanggal	Lisda D/ 27- 01-2026
	Direviu oleh/Tanggal	Putri G, Keke R/ 27- 01-2026
	Disetujui oleh/Tanggal	Yani DS/ 27- 01-2026

UAPA	☐	Kementerian Kesehatan RI
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No.	Nama Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
					Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
A.	Penerimaan Negara dan Hibah	1.710.525.000	8.625.740.211	-	-	-	8.625.740.211
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.710.525.000	8.625.740.211	-	-	-	8.625.740.211
2	Hibah	-				-	
B.	Belanja	-		-	-	-	-
	Rupiah Murni	28.103.396.000	21.852.217.879	-	-	-	-
1	Belanja Pegawai	12.998.369.000	12.970.690.899	-	-	-	12.970.690.899
2	Belanja Barang	14.367.336.000	8.177.276.137	-	-	-	8.177.276.137
3	Belanja Modal	737.691.000	704.250.843	-	-	-	704.250.843
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	PHLN	-	-	-	-	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-

*) Catatan :

[3] Nilai Pagu Dalam DIPA /revisi terakhir

[4] Realisasi dalam LRA Netto

Keterangan:

Sebelum reviu = Nilai realisasi dalam LRA

Usulan koreksi = Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

Status koreksi = Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

Setelah koreksi hasil reviu = Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU LAPORAN OPERASIONAL

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam LO)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
I	KEGIATAN OPERASIONAL					
A	PENDAPATAN OPERASIONAL					
1	Penerimaan Bukan Pajak	8.616.155.000	-	-	-	8.616.155.000
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	8.616.155.000	-	-	-	8.616.155.000
						-
B	BEBAN OPERASIONAL					
1	Beban Pegawai	12.970.690.899	-	-	-	12.970.690.899
2	Beban Persediaan	5.168.946.182	-	-	-	5.168.946.182
3	Beban Barang & Jasa	5.214.881.277	-	-	-	5.214.881.277
4	Beban Pemeliharaan	1.301.866.065	-	-	-	1.301.866.065
5	Beban Perjalanan Dinas	1.410.471.696	-	-	-	1.410.471.696
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
7	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	-
8	Beban penyusutan dan Amortisasi	2.184.785.877	-	-	-	2.184.785.877
9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-	-	-
10	Beban Lain- lain		-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	28.251.641.996	-	-	-	28.251.641.996
	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19.635.486.996)	-	-	-	(19.635.486.996)
		-	-	-	-	-
II	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
A	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	8.566.400	-	-	-	8.566.400
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.566.400	-	-	-	8.566.400
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
	Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
B	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
C	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	(4.857.208)	-	-	-	(4.857.208)
	Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	1.018.811	-	-	-	1.018.811
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.876.019)	-	-	-	(5.876.019)
	Jumlah Surplus/(defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.709.192	-	-	-	3.709.192
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.709.192	-	-	-	3.709.192
III	POS LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
	SURPLUS (DEFISIT)-LO	(19.631.777.804)	-	-	-	(19.631.777.804)

Keterangan :

- Sebelum reviu = Nilai akun dalam LO
- Usulan koreksi = Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung
- Status koreksi = Perbaikan saat reviu (sudah/belum)
- Setelah koreksi hasil reviu = Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam LPE)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
A	EKUITAS AWAL	70.716.982.011	-	-	-	70.716.982.011
B	SURPLUS/DEFISIT LO	(19.631.777.804)	-	-	-	(19.631.777.804)
C	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	-	-	-
D	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-
1	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-	-
2	Koreksi Aset Tetap	-	-	-	-	-
3	Koreksi Atas Beban	-	-	-	-	-
4	Koreksi Atas Pendapatan	-	-	-	-	-
5	Koreksi Lain-Lain	-	-	-	-	-
E	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.303.419.231	-	-	-	18.303.419.231
F	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.328.358.573)	-	-	-	(1.328.358.573)
G	EKUITAS AKHIR	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438

Keterangan :

Sebelum reviu

= Nilai akun dalam LPE

Usulan koreksi

= Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

Status koreksi

= Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

Setelah koreksi hasil reviu

= Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU NERACA

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam Neraca)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
A	Aset Lancar					
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-
3	Kas lainnya dan setara kas	-	-	-	-	-
4	Kas pada BLU	-	-	-	-	-
5	Investasi dlm Deposito	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Pendek-BLU	-	-	-	-	-
7	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-	-	-	-
8	Uang muka belanja (prepayment)	-	-	-	-	-
9	Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
11	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	-	-	-	-	-
12	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TTP/TGR	-	-	-	-	-
14	<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)</i>	-	-	-	-	-
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	-	-	-	-	-
16	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA	-	-	-	-	-
17	<i>Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA (Netto)</i>	-	-	-	-	-
18	Piutang dari kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-	-
19	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-	-
20	<i>Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	-	-	-	-	-
21	Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-	-
22	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-	-
23	Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	-	-	-	-	-
24	Persediaan	1.209.910.446	-	-	-	1.209.910.446
25	Persediaan BLU	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar	1.209.910.446	-	-	-	1.209.910.446
B	Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
3	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	-	-	-	-	-
4	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	-	-	-	-	-
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA	-	-	-	-	-
6	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU	-	-	-	-	-
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU	-	-	-	-	-
8	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU (Netto)	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-

C.	Aset Tetap	-	-	-	-	-
	Tanah	38.455.235.600	-	-	-	38.455.235.600
	Tanah BLU		-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	43.182.042.326	-	-	-	43.182.042.326
	Peralatan dan Mesin BLU		-	-	-	-
	Gedung dan Bangunan	29.429.070.250	-	-	-	29.429.070.250
	Gedung dan Bangunan BLU		-	-	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	683.893.440	-	-	-	683.893.440
	Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU		-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya BLU	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(43.532.340.026)	-	-	-	(43.532.340.026)
	Jumlah Aset Tetap	68.217.901.590	-	-	-	68.217.901.590
D.	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Aset tak berwujud	-	-	-	-	-
	Dana yang dibatasi penggunaannya	237.363.859	-	-	-	237.363.859
	Aset lain-lain	2.852.894.619	-	-	-	2.852.894.619
	Aset lain-lain BLU	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(2.852.894.619)	-	-	-	(2.852.894.619)
	Jumlah Aset Lainnya	237.363.859	-	-	-	237.363.859
	JUMLAH ASET (A+B+C+D)	69.665.175.895	-	-	-	69.665.175.895
		-	-	-	-	-
II	Kewajiban	-	-	-	-	-
	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-	-
	Utang kepada pihak ketiga	276.552.457	-	-	-	276.552.457
	Utang yang belum ditagihkan	-	-	-	-	-
	Utang jangka pendek lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	276.552.457	-	-	-	276.552.457
		-	-	-	-	-
III	EKUITAS	-	-	-	-	-
	Ekuitas	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438
	JUMLAH EKUITAS	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438
		-	-	-	-	-
IV	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (Kewajiban + Ekuitas)	69.665.175.895	-	-	-	69.665.175.895

Keterangan :

Sebelum reviu = Nilai akun dalam neraca
 Usulan koreksi = Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung
 Status koreksi = Perbaikan saat reviu (sudah/belum)
 Setelah koreksi hasil reviu = Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LRA UAKPA SELURUH AKUN LRA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern		No. Indeks KKR		KKR.SEL.AK.LRA		
		Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26- 01- 2026		
		Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26- 01-2026		
		Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26- 01- 2026		
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☒	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Seluruh Akun LRA					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah rincian akun LRA telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS. 2. Teliti apakah angka Estimasi Pendapatan dan Belanja pada LRA telah disajikan sesuai DIPA dengan melakukan penelusuran ke DIPA atau revisinya dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA. 3. Teliti apakah saldo akun LRA telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun Pendapatan memiliki saldo normal Kredit positif dan akun Belanja memiliki saldo normal Debit positif) dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA. 4. Teliti apakah saldo akun LRA telah sesuai dengan Buku Besar dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA. 5. Teliti apakah rekonsiliasi internal Penerimaan Perpajakan dan PNBPN telah dilakukan antara unit akuntansi dengan unit teknis melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal. 6. Teliti apakah rekonsiliasi eksternal Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN yang terkait melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. 7. Teliti apakah informasi keterangan terkait akun LRA telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. LRA telah disajikan sesuai BAS					SEL.AK.LRA-1.0	
2. LRA telah disajikan sesuai DIPA Revisi 7 tanggal 28 Agustus 2025					SEL.AK.LRA-2.0	
3. Saldo akun LRA telah sesuai dengan saldo normal					SEL.AK.LRA-3.0	
4. Saldo akun LRA telah sesuai dengan Buku Besar					SEL.AK.LRA-4.0	
5. Rekonsiliasi internal Penerimaan Perpajakan dan PNBPN telah dilakukan antara unit akuntansi dengan unit teknis					SEL.AK.LRA-5.0	
6. Rekonsiliasi eksternal Penerimaan Perpajakan, PNBPN dan Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN					SEL.AK.LRA-6.0	
7. Informasi Keterangan terkait akun LRA telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK					SEL.AK.LRA-7.0	
Simpulan						
1.						
2.						
3.						
4.						

5.
6.
7.
Komentar
KKR telah lengkap

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LRA UAKPA AKUN PNBP

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern		No. Indeks KKR		KKR.PNBP		
		Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26- 01-2026		
		Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26- 01-2026		
		Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26- 01-2026		
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712)-(024.05.415712)				
Komponen LK	☒	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo PNBPN di LRA telah sesuai dengan laporan PNBPN dari unit teknis dan bahwa seluruh akun PNBPN yang dikelola oleh unit teknis telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke laporan PNBPN. 2. Lakukan uji petik atas transaksi PNBPN dan Teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen setoran bukan pajak (SSBP yang telah dilengkapi dengan BPN), melalui penelusuran ke dokumen setoran bukan pajak. 3. Teliti apakah setiap transaksi pengembalian belanja tahun anggaran lalu telah dibukukan ke dalam akun PNBPN, melalui penelusuran dokumen SSPB ke jurnalnya. 4. Teliti apakah informasi terkait PNBPN telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo PNBPN di LRA telah sesuai dengan Laporan PNBPN dari unit teknis					PNBP-1.0	
2. Transaksi PNBPN telah didukung dokumen setoran bukan pajak					PNBP-2.0	
3. Transaksi pengembalian belanja tahun anggaran lalu telah dibukukan ke dalam akun PNBPN					PNBP-3.0	
4. Informasi terkait PNBPN telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK					PNBP-4.0	
Simpulan						
1.						
2.						
3.						
4.						
Komentar						
KKR telah lengkap						

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LRA UAKPA AKUN BELANJA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern		No. Indeks KKR		KKR.BEL		
		Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26- 01- 2026		
		Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26- 01-2026		
		Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26- 01- 2026		
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712)-(024.05.415712)				
Komponen LK	☒	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Belanja					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. 2. Lakukan uji petik atas transaksi Belanja dan teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D. 3. Teliti apakah pengembalian Belanja hanya merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB. 4. Teliti apakah pengembalian Belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB. 5. Teliti apakah setiap Belanja Modal telah dicatat dan menambah Aset Tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D ke junal dan Buku Besar. Lakukan pengecekan terhadap kertas kerja Belanja Modal-Aset Tetap yang dibuat oleh unit terkait apabila terdapat selisih antara nilai Belanja Modal dan nilai yang menambah nilai Aset Tetap pada SIMAK BMN. 6. Teliti apakah informasi terkait Belanja telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN					BEL-1.0	
2. Transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah					BEL-2.0	
3. Terdapat pengembalian belanja Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) sebesar Rp 397,211,- dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp. 621,600					BEL-3.0	
4. Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu yang sudah tercatat					BEL-4.0	
5. Terdapat Belanja Modal dan penambahan Aset Tetap					BEL-5.0	
6. Terdapat pengembalian belanja namun belum diungkapkan secara memadai dalam CaLK					BEL-6.0	
Simpulan						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

6.
Komentar
KKR telah lengkap

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA SELURUH AKUN LO

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.SEL.AK.LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Seluruh Akun LO					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah seluruh akun LO telah dicatat ke dalam Buku Besar sesuai dengan dokumen sumber. 2. Teliti apakah saldo akun LO telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun Pendapatan memiliki saldo normal Kredit positif dan akun Beban memiliki saldo normal Debit positif) dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar. 3. Teliti apakah Pendapatan Diterima di Muka yang bukan merupakan pendapatan pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian. 4. Teliti apakah Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang merupakan pendapatan pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian. 5. Teliti apakah Beban Dibayar di Muka yang bukan merupakan beban pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian. 6. Teliti apakah Beban yang Masih Harus Dibayar yang merupakan beban pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian. 7. Teliti secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal penyesuaian telah didukung dengan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukungnya. 8. Teliti apakah keterangan terkait akun LO telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Seluruh akun LO telah dicatat ke dalam Buku Besar sesuai dengan dokumen sumber					SEL.AK.LO- 1.0	
2. Saldo akun LO telah sesuai dengan saldo normal					SEL.AK.LO- 2.0	
3. Tidak terdapat Pendapatan yang Diterima di Muka yang bukan merupakan pendapatan pada periode berjalan					SEL.AK.LO- 3.0	
4. Tidak terdapat pendapatan yang Masih Harus Diterima yang merupakan pendapatan pada periode berjalan					SEL.AK.LO- 4.0	
5. Tidak terdapat Beban Dibayar di Muka yang bukan merupakan beban pada periode berjalan					SEL.AK.LO- 5.0	
6. Terdapat beban yang masih harus dibayar					SEL.AK.LO- 6.0	
7. Transaksi jurnal penyesuaian telah didukung dengan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukungnya					SEL.AK.LO- 7.0	
8. Keterangan terkait akun LO telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK					SEL.AK.LO- 8.0	
Simpulan						
1.						

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Komentar
KKR telah lengkap.

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA AKUN PNBP

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.PNBP.LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi		Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah seluruh PNBP-LO tahun berjalan telah dicatat ke dalam Buku Besar sesuai dengan dokumen sumber. 2. Lakukan penghitungan kembali untuk memastikan bahwa PNBP-LO telah mencerminkan pendapatan yang merupakan hak periode berjalan. 3. Teliti apakah PNBP-LO diakui/dicatat pada saat timbulnya hak/kewajiban dan tidak semata-mata pada saat kas masuk/keluar ke/dari kas negara dengan melakukan uji petik ke dokumen sumber. 4. Teliti apakah PNBP-LO Diterima Dimuka yang merupakan pendapatan pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian. 5. Teliti apakah PNBP-LO Yang Masih Harus Diterima yang merupakan pendapatan pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian. 6. Teliti apakah informasi terkait PNBP-LO telah disajikan secara memadai dalam CaLK.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Seluruh PNBP-LO tahun berjalan telah dicatat ke dalam Buku Besar sesuai dengan dokumen sumber					PNBP.LO- 1.0	
2. PNBP-LO telah mencerminkan pendapatan yang merupakan hak periode berjalan					PNBP.LO -2.0	
3. PNBP-LO diakui/ dicatat pada saat timbulnya hak/ kewajiban dan tidak semata-mata pada saat kas masuk/ keluar ke/ dari kas negara					PNBP.LO -3.0	
4. Tidak terdapat PNBP-LO Diterima Dimuka yang merupakan pendapatan pada periode berjalan					PNBP.LO -4.0	
5. Tidak terdapat PNBP-LO yang masih Harus Diterima yang merupakan pendapatan pada periode berjalan					PNBP.LO -5.0	
6. Informasi terkait PNBP-LO telah disajikan secara memadai dalam CaLK					PNBP.LO -6.0	
Simpulan						
1.						
2.						
3.						
4.						

5.
6.
Komentar
KKR telah lengkap

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA AKUN BEBAN PEGAWAI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.BBN.PEG.LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Beban Pegawai					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo Beban Pegawai telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun-akunnya dalam Buku Besar, dengan melakukan penelusuran dalam Buku Besar. 2. Teliti apakah penyesuaian akrual telah diinput dengan benar dan nilainya telah sesuai dengan dokumen sumber terkait: Beban pegawai yang masih harus dibayar contohnya uang makan untuk periode pelaporan yang belum dibayar, kenaikan gaji pegawai pada periode pelaporan yang belum dibayar, dll.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo Beban Pegawai telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun-akunnya dalam Buku Besar sebesar Rp. 12.970.690.899					BBN.PEG.LO- 1.0	
2. Tidak ada penyesuaian akrual					BBN.PEG.LO- 2.0	
Simpulan						
1.						
2.						
Komentar						
KKR telah lengkap						

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA AKUN BEBAN PERSEDIAAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.BBN.PRSD.LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Beban Persediaan					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Dapatkan nilai persediaan awal dari saldo awal neraca. 2. Dapatkan nilai persediaan akhir berdasarkan BA <i>stock opname</i> persediaan per akhir periode. 3. Dapatkan nilai pembelian persediaan berdasarkan dokumen sumber (SPM/SP2D Belanja Barang Persediaan). 4. Lakukan penghitungan saldo Beban Persediaan yang disajikan di LO dengan formulasi: saldo awal ditambah penambahan persediaan (baik yang berasal dari pembelian persediaan maupun transfer masuk), dikurangi persediaan akhir berdasarkan data dari unit teknis, melalui permintaan keterangan dan penghitungan kembali.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Nilai Persediaan Awal sebesar Rp. 1,186,380,844,-					BBN.PRSD.LO- 1.0	
2. Nilai Persediaan Akhir sebesar Rp. 1.209.910.446,-					BBN.PRSD.LO- 2.0	
3. Nilai Pembelian Persediaan Rp. 234,860,240,-					BBN.PRSD.LO- 3.0	
4. Saldo Beban Persediaan Rp. 1,258,468,908,- 593111 = Rp. 952,659,628,- 593149 = Rp. 4,216,286,554,- 596121 = Rp. 5,876,019,-					BBN.PRSD.LO- 4.0	
Simpulan						
1.						
2.						
3.						
4.						
Komentar						
KKR Telah Lengkap						

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA AKUN BEBAN BARANG DAN JASA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.BBN.BJS.LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Beban Barang dan Jasa					
Langkah-Langkah Reviu						
- Teliti apakah saldo Beban Barang dan Jasa telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun-akunnya dalam Buku Besar, dengan melakukan penelusuran dalam Buku Besar. - Teliti apakah penyesuaian akrual telah diinput dengan benar dan nilainya telah sesuai dengan dokumen sumber terkait: - Beban Belanja Barang dan Jasa yang masih harus dibayar contohnya listrik/air dan langganan daya dan jasa lainnya yang sudah digunakan/dinikmati pada periode berjalan namun belum dibayar, beban honor yang kegiatannya terjadi pada periode berjalan namun belum dibayar sampai akhir periode dll. - Beban Belanja Barang dan Jasa dibayar di muka contohnya beban sewa yang dibayar sekaligus untuk 1 (satu) tahun atau lebih harus disesuaikan dan diakui hanya untuk periode berjalan. - Apabila terdapat Beban Barang dan Jasa yang digunakan untuk membeli persediaan contohnya pembelian ATK dengan menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran, teliti apakah nilai pembelian persediaan tersebut telah dikeluarkan dari nilai Beban Barang dan Jasa.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo Beban Barang dan Jasa Rp. 5,214,881,277,- telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun- akunnya dalam Buku Besar 521111 = Rp. 811,117,741,- 521114 = Rp. 2,631,168,- 521115 = Rp. 144,600,000,- 521119 = Rp. 5,738,000,- 521211 = Rp. 392,112,762,- 521213 = Rp. 0,- 521252 = Rp 20,923,000,- 521219 = Rp. 2,405,000,- 522111 = Rp. 415,791,750,- 522112 = Rp. 32,614,540,- 522113 = Rp. 14,274,163,- 522141 = Rp. 65,688,002,- 522151 = Rp. 0,- 522191 = Rp. 3,159,656,526,-					BBN.BJS.LO- 1.0	
2. Tidak ada penyesuaian akrual					BBN.BJS.LO- 2.0	
3. Tidak terdapat Beban Barang dan Jasa yang digunakan untuk membeli persediaan					BBN.BJS.LO- 3.0	
Simpulan						

1.
2.
3.
Komentar
KKR telah lengkap

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA AKUN BEBAN PEMELIHARAAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.BBN.PMLR.LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi		Beban Pemeliharaan				
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo Beban Pemeliharaan telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun-akunnya dalam Buku Besar. 2. Teliti apakah penyesuaian akrual telah diinput dengan benar dan nilainya telah sesuai dengan dokumen sumber terkait: a. Beban Pemeliharaan yang masih harus dibayar; b. Beban Pemeliharaan dibayar dimuka contohnya kontrak kegiatan pemeliharaan yang dibayar sekaligus (dibayar dimuka). 3. Apabila terdapat Beban Pemeliharaan yang digunakan untuk membeli persediaan dengan menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, teliti apakah nilai pembelian persediaan tersebut telah dikeluarkan dari nilai Beban Pemeliharaan.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo Beban Pemeliharaan sebesar Rp.1,301,866,065,- 523111 = Rp. 316,621,083,- 523121 = Rp. 985,244,982,-					BBN.PMLR.LO- 1.0	
2. Tidak terdapat penyesuaian akrual					BBN.PMLR.LO- 2.0	
3. Tidak terdapat Beban Pemeliharaan yang digunakan untuk membeli persediaan dengan menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					BBN.PMLR.LO- 3.0	
Simpulan						
1.						
2.						
3.						
Komentar						
KKR telah lengkap						

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA AKUN BEBAN PERJALANAN DINAS

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.BBN.PERJADIN .LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi		Beban Perjalanan Dinas				
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo Beban Perjalanan Dinas telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun-akunnya dalam Buku Besar, dengan melakukan penelusuran dalam Buku Besar. 2. Teliti apakah penyesuaian akrual telah diinput dengan benar dan nilainya telah sesuai dengan dokumen sumber terkait Beban Perjalanan Dinas yang masih harus dibayar.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1,410,471,696,- telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun-akunnya dalam Buku Besar 524111 = Rp. 1,240,950,696,- 524113 = Rp. 169,521,000,-					BBN.PERJADIN.LO- 1.0	
2. Tidak terdapat penyesuaian akrual					BBN.PERJADIN.LO- 2.0	
Simpulan						
1.						
2.						
Komentar						
KKR telah lengkap						

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LO UAKPA AKUN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.BBN.SUSUT.LO	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK						
	☐	LRA	☒	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi		Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun-akunnya dalam Buku Besar, dengan melakukan penelusuran dalam Buku Besar. 2. Teliti apakah saldo masing-masing Beban Penyusutan dan Amortisasi telah sesuai dengan perhitungan.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.2,184,785,877,- telah sesuai dengan penjumlahan rincian akun akunnya dalam buku besar 591111 = Rp 1,555,697,490,- 591211 = Rp 614,385,021,- 591311 = Rp 9,145,882,- 591312 = Rp 5,557,484,-					BBN.SUSUT.LO- 1.0	
2. Saldo masing- masing beban penyusutan dan amortisasi telah sesuai dengan perhitungan					BBN.SUSUT.LO- 2.0	
Simpulan						
1.						
2.						
Komentar						
KKR telah lengkap						

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) LPE UAKPA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern		No. Indeks KKR		KKR.LPE		
		Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026		
		Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026		
		Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026		
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	X	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	X	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	LPE					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah Saldo Awal Ekuitas telah sesuai dengan Saldo Ekuitas Neraca periode sebelumnya. 2. Teliti apakah setiap Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar telah didukung dengan dokumen sumber. 3. Teliti apakah nilai akun Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dalam Neraca Percobaan telah sesuai dengan nilai Pendapatan dalam LRA. Contoh: ketidaksesuaian DDEL dengan Pendapatan disebabkan salah jurnal oleh operator. 4. Teliti apakah nilai akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) dalam Neraca Percobaan telah sesuai dengan nilai belanja dalam LRA. Contoh: ketidaksesuaian DKEL dengan Pendapatan disebabkan salah jurnal oleh operator. 5. Teliti apakah seluruh aset yang diterima oleh satker yang berasal dari luar entitas akuntansi telah tercatat pada akun Transfer Masuk. 6. Teliti apakah seluruh aset yang keluar dari entitas akuntansi telah tercatat pada akun Transfer Keluar. 7. Teliti apakah transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar telah didukung dengan dokumen sumber pencatatan yang sah. Contoh: Akun Transfer masuk atas aset tetap yang diterima oleh satker telah sesuai dengan Laporan Daftar BMN dan telah didukung oleh Berita Acara Serah Terima (BAST). 8. Teliti apakah koreksi hasil reviu atas Surplus/Defisit Laporan Operasional (jika ada) telah diperhitungkan pada LPE. 9. Teliti apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo awal ekuitas tahun 2025 telah sesuai dengan saldo ekuitas tahun 2024 sebesar Rp. 70.716.982.011					LPE-1.0	
2. Tidak terdapat Dampak Kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar					LPE-2.0	
3. Nilai Akun diterima dari entitas lain (DDEL) dalam neraca percobaan telah sesuai dengan nilai pendapatan dalam LRA sebesar Rp. 8.625.740.211,-					LPE-3.0	
4. Nilai akun ditagihkan ke entitas lain (DKEL) dalam neraca percobaan telah sesuai dengan nilai belanja dalam LRA sebesar Rp. 21.852.217.879,-					LPE-4.0	
5. Terdapat transfer masuk asset lancar pada tahun 2025 sebesar Rp.5.212.306.363,-					LPE-5.0	
6. Terdapat transfer keluar asset lancar pada tahun 2025 sebesar Rp. 135.364.800,-					LPE-6.0	
7. Sudah terdapat BAST dan Laporan Daftar BMN transfer Masuk dan keluar tahun 2025					LPE-7.0	
8. Perhitungan surplus / defisit laporan operasional sudah sesuai dengan LPE sebesar Rp. (19.631.777.804),-					LPE-8.0	

9. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas telah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan	LPE-9.0
Simpulan	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
Komentar	
KKR telah lengkap	
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.	

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA SELURUH AKUN NERACA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.SEL.AK.NRC	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinnan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Langkah-Langkah Reviu						
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☒	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Seluruh Akun Neraca					
1. Teliti apakah rincian akun Neraca telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS. 2. Teliti apakah saldo awal akun Neraca telah sama dengan saldo akhir akun Neraca periode sebelumnya, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya. 3. Teliti apakah saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun Aset memiliki saldo normal Debet positif dan akun Kewajiban memiliki saldo normal Kredit positif), dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar. 4. Teliti apakah saldo akun Neraca telah sesuai dengan Buku Besar, dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar. 5. Teliti apakah secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal penyesuaian/jurnal koreksi yang terkait akun Neraca telah didukung dengan Memo Penyesuaian, dengan menelusuri keberadaan Memo Penyesuaiannya. 6. Teliti apakah rekonsiliasi internal akun Neraca telah dilakukan antara unit penyusun LK dengan unit teknis, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal. 7. Teliti apakah rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara unit akuntansi dengan instansi terkait, antara lain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. 8. Teliti apakah unsur-unsur yang terdapat dalam CaLK telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Rincian akun Neraca telah disajikan sesuai BAS					SEL.AK.NRC-1.00	
2. Saldo awal akun Neraca Tahun 2026 telah sama dengan saldo akhir akun Tahun 2025 sebesar Rp. 69.388.623.438,-					SEL.AK.NRC-2.00	
3. Saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal					SEL.AK.NRC-3.00	
4. Saldo akun Neraca telah sesuai dengan Buku Besar					SEL.AK.NRC-4.00	
5. Setiap transaksi jurnal penyesuaian/jurnal koreksi yang terkait akun Neraca telah didukung dengan Memo Penyesuaian					SEL.AK.NRC-5.00	
6. Rekonsiliasi internal akun Neraca telah dilakukan antara unit penyusun LK dengan unit teknis					SEL.AK.NRC-6.00	
7. Rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara unit akuntansi dengan instansi terkait (KPPN)					SEL.AK.NRC-7.00	
8. Unsur-unsur yang terdapat dalam CaLK telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK					SEL.AK.NRC-8.00	
Simpulan						
1. -						

2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
Komentar
KKR Telah Lengkap
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.KAS.BND.KLR	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinnan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☒	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Kas Di Bendahara Pengeluaran					
Langkah-Langkah Reviu						
Teliti apakah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca hanya mencakup UP dan TUP dengan membandingkan saldo kas (Uang Tunai di Brankas, Saldo rekening Koran di Bank, bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, dan tidak termasuk Jasa Giro) dengan SP2D-UP dan SP2D-TUP. Teliti apakah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disajikan sebesar nilai rupiahnya, dengan melakukan penelusuran ke Register Penutupan Kas. Teliti apakah saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran adalah nihil, melalui penelusuran ke Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil, maka Teliti apakah saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya. Teliti apakah jumlah pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan adalah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, dan bukti-bukti pengeluarannya, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen dimaksud.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,-					KAS.BND.KLR.-1.00	
2. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah di sajikan sebesar Rp.0,-					KAS.BND.KLR.-2.00	
3. Tidak terdapat pengembalian belanja UP dan TUP					KAS.BND.KLR.-3.00	
4. Tidak terdapat pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan					KAS.BND.KLR.-4.00	
Simpulan						
1. -						
2. -						
3. -						
4. -						
Komentar						
KKR Telah Lengkap						
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.						

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern		No. Indeks KKR		KKR.KAS.BND.TRM		
		Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026		
		Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026		
		Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026		
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinnan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☒	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Kas Di Bendahara Penerimaan					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan di Neraca hanya mencakup hak negara yang belum disetorkan dan tidak mencakup uang milik pihak ketiga (seperti uang hasil lelang pihak ketiga dan uang jaminan), melalui perbandingan dengan perhitungan yang dibuat oleh unit teknis. 2. Teliti apakah saldo kas di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran adalah nihil , melalui penelusuran ke Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil, maka Teliti apakah saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya. 3. Teliti apakah saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disajikan sebesar nilai rupiahnya dengan menelusuri Register Penutupan Kas. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing, Teliti apakah saldo tersebut telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca, melalui permintaan keterangan dan perbandingan ke kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang Disajikan sebesar Rp. 0,-					KAS.BND.TRM-1.00	
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Triwulan IV adalah nihil					KAS.BND.TRM-1.00	
					KAS.BND.TRM-1.00	
Simpulan						
1. -						
2. -						
3. -						
Komentar						
KKR Telah Lengkap						
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.						

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA PERSEDIAAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern				No. Indeks KKR		KKR.PRSD	
				Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
				Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
				Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan					
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit					
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat					
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)					
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE	
	☒	Neraca	☐	CaLK			
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Persediaan						
Langkah-Langkah Reviu							
1. Teliti apakah Persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang telah dikeluarkan dari saldo Persediaan, melalui penelusuran ke Berita Acara Opname Fisik Persediaan dan Daftar Rekapitulasi Persediaan (SIMAK-BMN). 2. Untuk Persediaan Pita Cukai yang dikelola DJBC, teliti apakah nilai persediaan pita cukai di Neraca telah dicatat sebesar biaya pengganti cetak pita cukai tersebut (bukan nilai pita cukainya), melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Daftar Rekapitulasi Persediaan (SIMAK-BMN). 3. Teliti apakah saldo Persediaan yang disajikan di Neraca adalah sama dengan saldo fisik Persediaan dikalikan dengan biaya perolehan terakhir sesuai Berita Acara Opname Fisik Persediaan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Opname Fisik Persediaan. 4. Teliti apakah Barang Milik Negara yang berasal dari sitaan/rampasan/ tangkapan dan telah mendapat penetapan untuk dilelang sesuai Daftar Rekapitulasi Persediaan (SIMAK-BMN), telah disajikan dalam saldo Persediaan di Neraca melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen-dokumen dimaksud. 5. Teliti apakah unit akuntansi telah menggunakan Aplikasi Persediaan yang terdapat di SIMAK-BMN secara optimal, melalui permintaan keterangan dan perbandingan antara Berita Acara Opname Fisik Persediaan dengan Daftar Rekapitulasi Persediaan (SIMAK-BMN).							
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR		
1. Terdapat persediaan yang dalam kondisi rusak sebesar Rp. 1.453.977- Terdapat persediaan yang dalam kondisi usang sebesar Rp. 4,437,708,-					PRSD-1.00		
2. Tidak terdapat persediaan pita cukai yang dikelola DJBC					PRSD-1.00		
3. Saldo persediaan yang disajikan di neraca sama dengan Berita Acara Opname Fisik sebesar Rp. 1,209,910,446					PRSD-1.00		
4. Tidak terdapat BMN yang berasal dari sitaan/rampasan/tangkapan					PRSD-1.00		
5. unit akuntansi telah menggunakan Aplikasi Role Persediaan dan Role Aset yang terdapat di Aplikasi SAKTI secara optimal					PRSD-1.00		
Simpulan							
1. -							
2. -							
3. -							
4. -							
5. -							

Komentar
KKR telah Lengkap
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA AKUN ASET TETAP

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern				No. Indeks KKR		KKR.AT	
				Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
				Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
				Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan					
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit					
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat					
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)					
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE	
	☒	Neraca	☐	CaLK			
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Aset Tetap						
Langkah-Langkah Reviu							
Teliti apakah saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK. - Teliti apakah saldo Aset Tetap pada CaLK telah sesuai dengan Lampiran BMN, melalui penelaahan Lampiran BMN. - Teliti apakah Aset Tetap (misalnya Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK. Teliti apakah Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui permintaan keterangan. Teliti apakah setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain, melalui rekonsiliasi antara Daftar Realisasi Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain yang berasal dari pembelian, pengembangan nilai aset, Aset Tetap dalam renovasi, perolehan KDP, dan pengembangan KDP. Teliti apakah mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam SIMAK-BMN telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, Perolehan Lainnya, Pengurangan Nilai Aset, Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas, Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset, Penerimaan Aset Tetap Renovasi, Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah (Keluar), Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait. Teliti apakah untuk Aset Tetap yang dalam kondisi Rusak Berat/Usang telah direklasifikasi ke Aset Lainnya, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen Berita Acara Penghentian Penggunaan Aset Tetap ke akun Aset Lainnya.							
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR		
1. Saldo Aset tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset tetap di CaLK sebesar Rp. 68.217.901.590,- Tanah : Rp. 38.455.235.600,- Peralatan dan mesin : Rp. 43.182.042.326,- Gedung dan Bangunan : Rp. 29.429.070.250,- Jalan, irigasi dan jaringan : Rp. 683.893.440,- Akumulasi Penyusutan : Rp. (43.532.340.026),-					AT-1.00		
2. Saldo Aset Tetap pada CaLK telah sesuai dengan Lampiran BMN					AT-2.00		
3. Tidak terdapat aset tetap yang tidak didukung dengan dokumen yang sah					AT-3.00		
4. Tidak terdapat aset tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak					AT-4.00		
5. Setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset tetap atau aset lain-lain sebesar Rp. 840,373,843,-					AT-5.00		
6. Nilai mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap dalam Role Aset pada Aplikasi SAKTI telah sesuai dengan dokumen sumber					AT-6.00		

7. Tidak ada aset tetap yang dalam kondisi rusak berat / usang	AT-700
Simpulan	
1. -	
2. -	
3. -	
4. -	
5. -	
6. -	
7. -	
Komentar	
KKR Telah lengkap	
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.	

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA PENYUSUTAN ASET TETAP

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern				No. Indeks KKR		KKR.SST.AT	
				Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
				Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026					
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan					
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit					
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat					
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)					
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE	
	☒	Neraca	☐	CaLK			
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Penyusutan Aset Tetap						
Langkah-Langkah Reviu							
1. Dapatkan seluruh daftar Aset Tetap. 2. Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan. 3. Teliti apakah perhitungan penyusutan asset tetap telah sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.							
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)						No. Indeks KKR	
1. Telah mendapatkan seluruh daftar aset tetap						SST.AT-1.00	
2. Telah teridentifikasi aset – aset yang harus disusutkan						SST.AT-2.00	
3. Perhitungan penyusutan asset tetap telah sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku (PMK No 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat penyusutan BMN berupa aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat)						SST.AT-3.00	
Simpulan							
1. -							
2. -							
3. -							
Komentar							
KKR Telah Lengkap							
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.							

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA ASET LAINNYA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.AL	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☒	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Aset Lainnya					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo Aset Lainnya di Neraca telah sesuai dengan dokumen rekapitulasi dari unit teknis/pengelola. 2. Lakukan uji petik atas transaksi Aset Lainnya dan Teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen terkait. 3. Teliti apakah satuan kerja telah melakukan inventarisasi dan merekam aset tak berwujud ke dalam SIMAK-BMN, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Laporan Aset Lainnya.						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Tidak terdapat aset lainnya					AL-1.00	
2. Setiap transaksi aset lainnya telah didukung oleh dokumen yang sah					AL-2.00	
3. Terdapat aset tak berwujud sebesar Rp. 0,-					AL-3.00	
Simpulan						
1. -						
2. -						
3. -						
Komentar						
KKR Telah Lengkap						
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.						

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA KEWAJIBAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern			No. Indeks KKR		KKR.KWJ	
			Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
			Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
			Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☒	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Kewajiban					
Langkah-Langkah Reviu						
1. Teliti apakah saldo Kewajiban di Neraca telah sesuai dengan laporan rekapitulasi kewajiban dari unit teknis dan bahwa seluruh akun Kewajiban yang dikelola oleh unit teknis telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke laporan rekapitulasi kewajiban. 2. Lakukan uji petik atas transaksi Kewajiban dan teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait (misalnya dokumen tagihan, SPM dan SP2D).						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)					No. Indeks KKR	
1. Telah sesuai saldo kewajiban di Neraca dengan laporan rekapitulasi kewajiban					SEL.AK.NRC-1.00	
2. Telah dilakukan uji petik berupa tagihan, SPM dan SP2D					SEL.AK.NRC-2.00	
Simpulan						
1. -						
2. -						
Komentar						
KKR Telah lengkap						
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.						

KERTAS KERJA REVIU (KKR) NERACA UAKPA UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern				No. Indeks KKR		KKR.UT.TGA	
				Disusun oleh/Tanggal		Lisda D / 26-01-2026	
				Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R / 26-01-2026	
				Disetujui oleh/Tanggal		Yani D S / 26-01-2026	
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan					
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit					
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat					
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)					
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE	
	☒	Neraca	☐	CaLK			
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Utang Kepada Pihak Ketiga						
Langkah-Langkah Reviu							
1. Dapatkan informasi mengenai tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan. Teliti apakah tagihan kepada pihak ketiga tersebut telah dibukukan sebagai Kewajiban di Neraca. 2. Teliti apakah saldo Utang Kepada Pihak Ketiga telah mencakup: a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga yang belum diserahkan telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga; b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai nilai yang diakui pada periode pelaporan. 3. Lakukan uji petik atas Utang Kepada Pihak Ketiga dan teliti apakah setiap transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah , melalui penelusuran ke dokumen-dokumen terkait.							
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)						No. Indeks KKR	
1. Sudah mendapatkan informasi tagihan pihak ketiga dan telah dibukukan						SEL.AK.NRC-1.00	
2. a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan utang pihak ketiga yang telah dicatat sebesar Rp. 276.552.457,-						SEL.AK.NRC-2.a	
b. Saldo utang pada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan telah dicatat dalam jurnal penyesuaian						SEL.AK.NRC-2.b	
3. Telah di lakukan uji petik atas utang kepada pihak ketiga						SEL.AK.NRC-3.00	
Simpulan							
1. -							
2. a.-							
b.-							
3. -							
Komentar							
KKR Telah lengkap							
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.							

KERTAS KERJA REVIU (KKR) CaLK UAKPA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Satuan Kepatuhan Intern		No. Indeks KKR		KKR.CLK		
		Disusun oleh/Tanggal		Lisda D/ 26- 01-2026		
		Direviu oleh/Tanggal		Putri G, Keke R/ 26- 01-2026		
		Disetujui oleh/Tanggal		Yani DS/ 26- 01-2026		
UAPA	☐	Kementerian Kesehatan				
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit				
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat				
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)				
Komponen LK	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☒	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	Seluruh Akun dan Lampiran LK.					
Langkah-Langkah Reviu						
Teliti apakah LK Tahunan telah memuat informasi mengenai: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK. - Gambaran ringkas mengenai LK - Daftar tabel (nama tabel dan nomor halaman). - Daftar grafik (nama grafik dan nomor halaman). - Daftar lampiran (nama lampiran dan nomor halaman). - Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup unit kerjanya yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan memuat pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan dan isi LK yang disampaikan; bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan bahwa LK telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. - Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan, yang mencakup gambaran mengenai LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. - Lembar Muka LRA, LO, LPE, dan Neraca. - Penjelasan umum terkait dasar hukum penyusunan LK, kebijakan teknis entitas pelaporan, pendekatan penyusunan LK, basis akuntansi, dasar pengukuran, dan kebijakan akuntansi. - Penjelasan atas pos-pos LRA: Realisasi pendapatan dan belanja, masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI (laporan semester I atau laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan). - Jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Penerimaan telah dijelaskan di CaLK. Realisasi Penerimaan juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan (dalam bentuk tabel per jenis penerimaan). - Jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial) telah dijelaskan dalam CaLK. Realisasi Belanja juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan. - CaLK telah disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. - Penjelasan atas LO disajikan untuk pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut: perbandingan dengan periode yang lalu; penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan, rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi; penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. - Penjelasan atas LPE disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut: perbandingan dengan periode yang lalu; penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; rincian yang diperlukan; penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.						

16. Penjelasan atas pos-pos Neraca:

Aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI (laporan semester I atau laporan Tahunan).

- a. **Kas di Bendahara Pengeluaran** disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana UP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca atau diperhitungkan dengan dana UP tahun anggaran berikutnya. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam CaLK. Untuk saldo UP yang disetor sesudah tanggal 31 Desember, harus diungkapkan tanggal setor dan dilampirkan bukti SSBP-nya.
- b. **Kas di Bendahara Penerimaan** disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini baik yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara maupun uang pihak ketiga yang masih berada di Bendahara Penerimaan dengan melampirkan rekening koran. Apabila masih terdapat uang milik pihak ketiga, maka hal tersebut harus diungkapkan di CaLK beserta tanggal penyetorannya.
- c. **Persediaan** disajikan dan **diungkapkan** secara memadai, dengan mengungkapkan:
 - 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 3) Kondisi persediaan;
 - 4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan;
 - 5) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
- d. **Aset Tetap** disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya;
 - 3) Informasi penyusutan;
 - 4) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
 - 5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
 - 6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - 8) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal tambahan yang harus diungkapkan: dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen (jika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

17. Penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca, termasuk apabila terdapat hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan LRA, LO, LPE, dan Neraca namun mempengaruhi LK, misalnya reorganisasi, *force majeure*, sengketa peradilan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan unit akuntansi.

18. Lampiran pendukung yaitu LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, serta Neraca Percobaan.

19. Lampiran laporan barang pengguna yaitu Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan, Laporan Kondisi Barang (khusus LK Tahunan), dan Rincian Saldo Awal.

20. Lampiran Laporan Rekening Pemerintah.

21. Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK, dengan menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta daftar temuan BPK dan tindak lanjutnya.

22. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK seperti Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan.

Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu		No. Indeks KKR
1.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan Periode Penyampaian LK	CALK-1.0
2.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai gambaran ringkas mengenai LK	CALK-2.0
3.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai daftar tabel (nama tabel dan nomor halaman)	CALK-3.0

4.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai daftar grafik (nama grafik dan nomor halaman)	CALK-4.0
5.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai lampiran (nama lampiran dan nomor halaman)	CALK-5.0
6.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Pernyataan Tanggungjawab dari Pengguna Anggaran	CALK-6.0
7.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan (LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK)	CALK-7.0
8.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Lembar Muka LRA, LO, LPE dan Neraca	CALK-8.0
9.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Dasar Hukum Penyusunan LK, kebijakan teknis entitas pelaporan, pendekatan penyusunan LK, basis akuntansi, dasar pengukuran, dan kebijakan akuntansi	CALK-9.0
10.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai penjelasan atas pos-pos LRA	CALK-10.0
11.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Penerimaan	CALK-11.0
12.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Belanja	CALK-12.0
13.	LK Tahunan telah memuat informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran	CALK-13.0
14.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai penjelasan atas LO terkait perbandingan dengan periode yang lalu; penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan, rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi; penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.	CALK-14.0
15.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Penjelasan atas LPE disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut: perbandingan dengan periode yang lalu; penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; rincian yang diperlukan.	CALK-15.0
16. a	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Penjelasan atas Kas di Bendahara Pengeluaran	CALK-16.a
16. b	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Penjelasan atas Kas di Bendahara Penerimaan	CALK-16.b
16.c	Pada CaLK Tahunan persediaan telah diungkapkan secara memadai	CALK-16.c
16.d	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Penjelasan atas Kas di Aset tetap	CALK-16.d
17.	LK Tahunan telah memuat informasi mengenai Penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca	CALK-17.0
18.	Terdapat lampiran pendukung yaitu LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, serta Neraca Percobaan	CALK-18.0
19.	Terdapat Lampiran laporan barang pengguna yaitu Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan, Laporan Kondisi Barang (khusus LK Tahunan), dan Rincian Saldo Awal	CALK-19.0
20.	Terdapat Lampiran Rekening Pemerintah	CALK-20.0
21.	Tidak ada temuan BPK ditahun sebelumnya	CALK-21.0
22.	Terdapat lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK seperti laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan	CALK-22.0
Simpulan		
1.	-	
2.	-	
3.	-	

4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14.
15. -
16.a -
16.b -
16. c -
16.d -
17. -
18. -
19. -
20. -
21. -
22. -
Komentar
KKR Telah Lengkap
Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SATUAN KEPATUHAN INTERN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN

1. Obyek Reviu : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
2. Alamat Obyek Reviu : Jl Cikapayang No 5 Bandung
3. Sasaran Pendampingan : Laporan Keuangan
4. Periode Laporan Keuangan : 1 Januari – 31 Desember 2025
5. Surat Tugas No./Tgl : PS.03.05/C.X.5/ 295 /2026 Tanggal 26 Januari 2026
6. Waktu Reviu :
 Rencana : 26 s.d 27 Januari 2026
 Realisasi : 26 s.d 27 Januari 2026

NO	URAIAN KEGIATAN	TGL	NAMA PEJABAT	PARAF
1.	Laporan yang telah selesai dari Ketua Tim Penyusun LK diserahkan kepada Tim Reviu pada hari pertama setelah selesai penugasan	26 Januari	Lisda Daryati	
2.	Laporan direviu oleh Tim Reviu dan diparaf.	26 Januari	Putri Garnadithia, SAP Keke Riskawati, SKM	
3.	Laporan diserahkan ke Ketua TIM SKI selaku Tim Reviu LK TA 2025 BKK Kelas I Bandung dan di paraf.	27 Januari	Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM	
4.	Laporan yang telah selesai ditandatangani oleh Penanggungjawab Reviu diserahkan ke Subbag Administrasi Umum BKK Kelas I Bandung dan dibuatkan surat pengantar ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.	27 Januari	Wartoni, SKM, MPH	
5.	Kepala BKK Kelas I Bandung menandatangani Surat Pengantar Laporan	27 Januari	dr. Sedya Dwisangka, M.Epid	
6.	Laporan selesai, diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang di upload di Google drive Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.	27 Januari	Lisda Daryati	

Catatan :

Laporan Reviu Laporan Keuangan BKK Kelas I Bandung TA 2025 telah selesai

No. Surat Pengantar Laporan: PS.03.05/C.X.5/ /2026 Tanggal Januari 2026

**Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Satuan Kepatuhan Intern**

**IHTISAR HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
(KD-024.05.415712)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Satuan Kepatuhan Intern

Disusun oleh/Tanggal

Lisda D/ 27- 01-2026

Direviu oleh/Tanggal

Putri G, Keke R/ 27-01-2026

Disetujui oleh/Tanggal

Yani DS/ 27- 01-2026

UAPA	☐	Kementerian Kesehatan RI
UAPPA-E1	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
UAPPA-W	☐	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit – Provinsi Jawa Barat
UAKPA	☒	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung (KD-415712) – (024.05.415712)

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No.	Nama Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
					Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
A.	Penerimaan Negara dan Hibah	1.710.525.000	8.625.740.211	-	-	-	8.625.740.211
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.710.525.000	8.625.740.211	-	-	-	8.625.740.211
2	Hibah	-	-	-	-	-	-
B.	Belanja	-	-	-	-	-	-
	Rupiah Murni	28.103.396.000	21.852.217.879	-	-	-	-
1	Belanja Pegawai	12.998.369.000	12.970.690.899	-	-	-	12.970.690.899
2	Belanja Barang	14.367.336.000	8.177.276.137	-	-	-	8.177.276.137
3	Belanja Modal	737.691.000	704.250.843	-	-	-	704.250.843
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	PHLN	-	-	-	-	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-

*) Catatan :

[3] Nilai Pagu Dalam DIPA /revisi terakhir

[4] Realisasi dalam LRA Netto

Keterangan:

Sebelum reviu

= Nilai realisasi dalam LRA

Usulan koreksi

= Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

Status koreksi

= Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

Setelah koreksi hasil reviu

= Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU LAPORAN OPERASIONAL

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam LO)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
I	KEGIATAN OPERASIONAL					
A	PENDAPATAN OPERASIONAL					
1	Penerimaan Bukan Pajak	8.616.155.000	-	-	-	8.616.155.000
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	8.616.155.000	-	-	-	8.616.155.000
						-
B	BEBAN OPERASIONAL					
1	Beban Pegawai	12.970.690.899	-	-	-	12.970.690.899
2	Beban Persediaan	5.168.946.182	-	-	-	5.168.946.182
3	Beban Barang & Jasa	5.214.881.277	-	-	-	5.214.881.277
4	Beban Pemeliharaan	1.301.866.065	-	-	-	1.301.866.065
5	Beban Perjalanan Dinas	1.410.471.696	-	-	-	1.410.471.696
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
7	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	-
8	Beban penyusutan dan Amortisasi	2.184.785.877	-	-	-	2.184.785.877
9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-	-	-
10	Beban Lain- lain		-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	28.251.641.996	-	-	-	28.251.641.996
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19.635.486.996)	-	-	-	(19.635.486.996)
		-	-	-	-	-
II	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
A	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	8.566.400	-	-	-	8.566.400
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.566.400	-	-	-	8.566.400
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
	Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
B	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
C	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	(4.857.208)	-	-	-	(4.857.208)
	Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	1.018.811	-	-	-	1.018.811
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.876.019)	-	-	-	(5.876.019)
	Jumlah Surplus/(defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.709.192	-	-	-	3.709.192
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.709.192	-	-	-	3.709.192
III	POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
	Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
	SURPLUS (DEFISIT)-LO	(19.631.777.804)	-	-	-	(19.631.777.804)

Keterangan :

Sebelum reviu

Usulan koreksi

Status koreksi

Setelah koreksi hasil reviu

= Nilai akun dalam LO

= Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

= Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

= Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam LPE)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
A	EKUITAS AWAL	70.716.982.011	-	-	-	70.716.982.011
B	SURPLUS/DEFISIT LO	(19.631.777.804)	-	-	-	(19.631.777.804)
C	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	-	-	-
D	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-
1	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-	-
2	Koreksi Aset Tetap	-	-	-	-	-
3	Koreksi Atas Beban	-	-	-	-	-
4	Koreksi Atas Pendapatan	-	-	-	-	-
5	Koreksi Lain-Lain	-	-	-	-	-
E	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.303.419.231	-	-	-	18.303.419.231
F	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.328.358.573)	-	-	-	(1.328.358.573)
G	EKUITAS AKHIR	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438

Keterangan :

Sebelum reviu

= Nilai akun dalam LPE

Usulan koreksi

= Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung

Status koreksi

= Perbaikan saat reviu (sudah/belum)

Setelah koreksi hasil reviu

= Nilai akun yang seharusnya setelah direviu

IKHTISAR HASIL REVIU NERACA

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Nilai Dalam Neraca)	Usulan Koreksi	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = 4-5	[7] = 4+5
A	Aset Lancar					
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-
3	Kas lainnya dan setara kas	-	-	-	-	-
4	Kas pada BLU	-	-	-	-	-
5	Investasi dlm Deposito	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Pendek-BLU	-	-	-	-	-
7	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-	-	-	-
8	Uang muka belanja (prepayment)	-	-	-	-	-
9	Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
11	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	-	-	-	-	-
12	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TTP/TGR	-	-	-	-	-
14	<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)</i>	-	-	-	-	-
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	-	-	-	-	-
16	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA	-	-	-	-	-
17	<i>Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA (Netto)</i>	-	-	-	-	-
18	Piutang dari kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-	-
19	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-	-
20	<i>Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	-	-	-	-	-
21	Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-	-
22	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-	-
23	Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	-	-	-	-	-
24	Persediaan	1.209.910.446	-	-	-	1.209.910.446
25	Persediaan BLU	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar	1.209.910.446	-	-	-	1.209.910.446
B	Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	-	-	-	-
3	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	-	-	-	-	-
4	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	-	-	-	-	-
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan TPA	-	-	-	-	-
6	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU	-	-	-	-	-
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU	-	-	-	-	-
8	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU (Netto)	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-

C.	Aset Tetap	-	-	-	-	-
	Tanah	38.455.235.600	-	-	-	38.455.235.600
	Tanah BLU		-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	43.182.042.326	-	-	-	43.182.042.326
	Peralatan dan Mesin BLU		-	-	-	-
	Gedung dan Bangunan	29.429.070.250	-	-	-	29.429.070.250
	Gedung dan Bangunan BLU		-	-	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	683.893.440	-	-	-	683.893.440
	Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU		-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya BLU	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(43.532.340.026)	-	-	-	(43.532.340.026)
	Jumlah Aset Tetap	68.217.901.590	-	-	-	68.217.901.590
D.	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Aset tak berwujud	-	-	-	-	-
	Dana yang dibatasi penggunaannya	237.363.859	-	-	-	237.363.859
	Aset lain-lain	2.852.894.619	-	-	-	2.852.894.619
	Aset lain-lain BLU	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(2.852.894.619)	-	-	-	(2.852.894.619)
	Jumlah Aset Lainnya	237.363.859	-	-	-	237.363.859
	JUMLAH ASET (A+B+C+D)	69.665.175.895	-	-	-	69.665.175.895
		-	-	-	-	-
II	Kewajiban	-	-	-	-	-
	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-	-
	Utang kepada pihak ketiga	276.552.457	-	-	-	276.552.457
	Utang yang belum ditagihkan	-	-	-	-	-
	Utang jangka pendek lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	276.552.457	-	-	-	276.552.457
		-	-	-	-	-
III	EKUITAS	-	-	-	-	-
	Ekuitas	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438
	JUMLAH EKUITAS	69.388.623.438	-	-	-	69.388.623.438
		-	-	-	-	-
IV	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (Kewajiban + Ekuitas)	69.665.175.895	-	-	-	69.665.175.895

Keterangan :

Sebelum reviu = Nilai akun dalam neraca
 Usulan koreksi = Nilai koreksi menurut pereviu (tambah/kurang) sesuai dokumen pendukung
 Status koreksi = Perbaikan saat reviu (sudah/belum)
 Setelah koreksi hasil reviu = Nilai akun yang seharusnya setelah direviu



MONITORING POTONGAN SPM (SATKER PENERIMA)

Akun Pajak / Non Pajak : Non Pajak Tanggal : 01-08-2025 s.d. 25-08-2025

No.	No. SPM Tgl. SPM	No. SP2D/NTPN Tgl. SP2D No. Tagihan	Satker Penerima	Uraian SPM	Atas Nama	Setoran	Akun	Jumlah
1	00235T/415712/2025 22-08-2025	259991320263330 25-08-2025 1053111762	415712	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Juni sd Agustus 2025 untuk 1 pegawai /4 jiwa an H. Eddy Harianto	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG	Belanja Tunjangan Umum PNS	511151	570,000
2	00229T/415712/2025 13-08-2025	259991320234483 13-08-2025 1052981986	415712	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Mei sd Agustus 2025 untuk 1 pegawai /3 jiwa an Tukitno	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	24

JURNAL PENYESUAIAN KHUSUS

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE :2025-12

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

ESELON 1 : 05

WILAYAH/PROPINSI : 0200

SATUAN KERJA : 415712

JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

Kantor Daerah

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Kantor Daerah

Tanggal : 21-01-2026

Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	009	Langganan Internet Desember 2025	415712.022.212112.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0.00	2,903,418.00	Belum
31-12-2025	009	Langganan Internet Desember 2025	415712.022.521111.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,903,418.00	0.00	Belum
31-12-2025	008	Langganan Telepon Desember 2025	415712.022.212112.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0.00	1,950,000.00	Belum
31-12-2025	008	Langganan Telepon Desember 2025	415712.022.522112.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	522112	Belanja Langganan Telepon	1,950,000.00	0.00	Belum
31-12-2025	007	Langganan Air Desember 2025	415712.022.212112.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0.00	808,298.00	Belum
31-12-2025	007	Langganan Air Desember 2025	415712.022.522113.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	522113	Belanja Langganan Air	808,298.00	0.00	Belum
31-12-2025	006	Langganan listrik Desember 2025	415712.022.212112.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0.00	33,526,882.00	Belum
31-12-2025	006	Langganan listrik Desember 2025	415712.022.522111.0240500.0000000.0000000000.000000.000000.2.0251.2.000000.00	522111	Belanja Langganan Listrik	33,526,882.00	0.00	Belum
						39,188,598.00	39,188,598.00	

JURNAL MANUAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2025-12

KEMENTERIAN : 024
ESELON 1 : 05
WILAYAH/PROPINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
Kantor Daerah
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Kantor Daerah

Tanggal : 26-01-2026
Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	005	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga IT, Resepsionis dan Adminitrasi BKK Kelas I Bandung TA 2025 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/919/2025	415712.022.212191.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	212191	AKRUAL	0	36,329,301	Belum
31-12-2025	005	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga IT, Resepsionis dan Adminitrasi BKK Kelas I Bandung TA 2025 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/919/2025	415712.022.218111.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	218111	AKRUAL	36,329,301	0	Belum
31-12-2025	004	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengamanan BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/915/2025	415712.022.212191.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	212191	AKRUAL	0	79,937,278	Belum
31-12-2025	004	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengamanan BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/915/2025	415712.022.218111.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	218111	AKRUAL	79,937,278	0	Belum
31-12-2025	003	Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Cleaning Service BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/917/2025	415712.022.212191.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	212191	AKRUAL	0	64,585,280	Belum
31-12-2025	003	Pembayaran Pengadaan Jasa Outsourcing Cleaning Service BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/917/2025	415712.022.218111.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	218111	AKRUAL	64,585,280	0	Belum
31-12-2025	002	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengemudi BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/909/2025	415712.022.212191.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	212191	AKRUAL	0	40,662,000	Belum

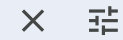
JURNAL MANUAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2025-12

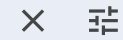
KEMENTERIAN : 024
ESELON 1 : 05
WILAYAH/PROPINSI : 0200
SATUAN KERJA : 415712
JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
Kantor Daerah
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Kantor Daerah

Tanggal : 26-01-2026
Halaman : 2

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	002	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Pengemudi BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin Akhir/9 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/8.2/909/2025	415712.022.218111.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	218111	AKRUAL	40,662,000	0	Belum
31-12-2025	001	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Internet Service Provider Kantor Induk BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin akhir/8 sesuai BAST Nomor BJ.01.04/8.1/911/2025 5 Tanggal 31-12-2025	415712.022.212191.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	212191	AKRUAL	0	15,850,000	Belum
31-12-2025	001	Pembayaran RPATA Pengadaan Jasa Internet Service Provider Kantor Induk BKK Kelas I Bandung TA 2025 Termin akhir/8 sesuai BAST Nomor BJ.01.04/8.1/911/2025 5 Tanggal 31-12-2025	415712.022.218111.0240500.0000000. 0000000000.000000.2.0251.2.000000.00000	218111	AKRUAL	15,850,000	0	Belum
						237,363,859	237,363,859	





▼ More



BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 Oktober 2025

Nomor : 01645/PB/415712/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 51.500.000,00

Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Labkesmas Jakarta

Untuk Pembayaran : Biaya pemeriksaan leptosiora dan hantavirus (Labkesmas Jakarta)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 01656/KW/415712/2025

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : INVOICE .

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 024.05.DO.4249.QAH.522191

Kode : 024.05.DO

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 Oktober 2025

Bendahara Pengeluaran



HILDA FUZIDA ASRI, SAB

199005102010122001

Diterima tanggal 28.10.25

Penerima Uang/ Uang Muka

Labkesmas Jakarta
TRANSFER

KOTA BANDUNG , 28 Oktober 2025

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD DANI
SUARMAN, SE

NIP. 198806032015031004

Dicetak pada tanggal 29 Oktober 2025



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820251023640917
Tanggal Billing	: 23-10-2025 14:45:15
Tanggal Kedaluwarsa	: 30-10-2025 14:45:15
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Kementerian/Lembaga	: 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Eselon I	: 03 - DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
Satuan Kerja	: 690786 - BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA
Total Disetor	: 51.500.000 (IDR)
Terbilang	: Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: I. JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL - I. Jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat - A. Pemeriksaan Spesimen Klinik - 7. Biomolekuler: - c. Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR)
Kode Akun	: 425313 - Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Jumlah Setoran	: 51.500.000 (IDR)
Keterangan	: -

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawahlah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

No.K.

LB-IV.7.8.1.2

Telah diterima dari BKK Bandung

Uang Sejumlah lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran Biaya pengujian sesuai PMK Nomor 45 Tahun 2024

Terbilang

51.500.000

Jakarta 27 Oktober 2025
Bendahara Penerima
Labkesmas Jakarta

TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN !




Ferantika

Bantu kami menjaga dan meningkatkan pelayanan publik di **BBLabkesmas Jakarta** dengan memberikan penilaian melalui **QR Code** disamping



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN KESEHATAN

Data Tagihan :

Kode Billing : 820251023640917
Tanggal Billing : 23-10-2025 14:45:15
Tanggal Kedaluwarsa : 30-10-2025 14:45:15
Tanggal Bayar : -
Kelompok PNBPN : Fungsional
Mata Uang : IDR
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Eselon I : 03 - DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
Satuan Kerja : 690786 - BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA
Total Disetor : 51.500.000 (IDR)
Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

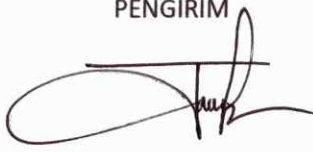
Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG	1. JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL - 1. Jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat - A. Pemeriksaan Spesimen Klinik - 7. Biomolekuler: - c. Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR)	425313 - Pendapatan - Layanan Fasilitas Kesehatan	250.000	206	per sampel	51.500.000	-

**FORM SERAH TERIMA SAMPEL
DARI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
KE BBLKM JAKARTA**

TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL 25 Agustus 2025 JAM
NAMA PENGIRIM	
TRANSPORTASI PENGIRIMAN	Darat
IDENTITAS SAMPEL	PR01 - PR 86 ; CR.01 - CR.08 ; IM.01 - IM.20 P.01 - P.30 ; P.33 - P.86 ; I.01 - I.02.
JUMLAH SAMPEL	Ginggal 114 sampel Paru 86 sampel
PERMOHONAN PEMERIKSAAN	PCR Leptospirosis dan Hantavirus
TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL 25 Agustus 2025 JAM
NAMA PENERIMA	Agus Anwar

PENGIRIM


(RYAN JULIANIYAH)

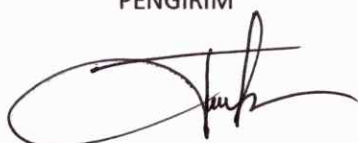
PENERIMA


(Agus Anwar)


**FORM SERAH TERIMA SAMPEL
DARI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
KE BBLKM JAKARTA**

TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL 27 October 2025 JAM
NAMA PENGIRIM	
TRANSPORTASI PENGIRIMAN	Darat
IDENTITAS SAMPEL	PA-87 - PR. 92
JUMLAH SAMPEL	6 Sampel ginjal tikus
PERMOHONAN PEMERIKSAAN	PCR Leptospirosis
TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL 27 October 2025 JAM
NAMA PENERIMA	Agus Ari Wibowo

PENGIRIM


(.....RYAN JULIANSYAH.....)

PENERIMA


(.....Agus Ari.....)


Status	Created	Transaction ID	Document No	Menu	Amount Currency	Transaction Amount	Credit Account Number	Credit Account Name (From Host)	Credit Currency	Credit Amount	Credit Bank Country	Debit Account Number	Debit Account Name	Debit Currency	Transaction Date	Product	Transaction Reference	Created By	File Name
--------	---------	----------------	-------------	------	-----------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	----------------	------------------	---------	-----------------------	------------	-----------

Success	Oct 28 2025, 10:04:12 (GMT+7)	202510281004883643	202510281004883643	Single Bill Payment	IDR	51,500,000.00	820251023640917	28/10/2025 10:03:10	IDR	51,500,000.00	Indonesia	8100124157121000	BPG 022 KANKES PLBHN	IDR	Oct 28, 2025	Bill Payment	Leptosiora Hantavir	HILDA	-
---------	-------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----	---------------	-----------------	---------------------	-----	---------------	-----------	------------------	----------------------	-----	--------------	--------------	---------------------	-------	---

Selected Transaction Summary

	Currency	Selected Tasks	Transaction Amount	Total Charge	Total Amount
Credit	IDR	1	51,500,000.00	0.00	51,500,000.00
Debit	IDR	1	51,500,000.00	0.00	51,500,000.00

DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL
TAHUN : 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON 1 : 05 DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROPINSI : 0200 Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 415712 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Tanggal : 28-01-2026
Halaman : 1

No	No. SP2D / No. Referensi	Tanggal	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Unit Satker Intraco	Uraian
BEBAN									
1	259991702050651	30-10-2025	00001/BLJ/415712/2025	28-10-2025	522191 - Belanja Jasa Lainnya	51,500,000	690786	024.03	belanja pemeriksaan leptosiora dan hantavirus
Total						51,500,000			